

LAPORAN PENELITIAN

EFEKTIFITAS UU. NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi Terhadap Zakat dalam Memberdayakan Ekonomi *Mustahiq* Zakat
Di Kota Pekanbaru)



OLEH:

H. MAGHFIRAH, MA

NIP. 197410252003121002

MUHAMMAD ALBAHI, SE, M. Si. Ak

NIP. 198002262009121002

RISKI ALWI

NIM. 11121100343

DIBIAYAI OLEH

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN ANGGARAN 2014

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

R I A U

2014

ABSTRAKSI

Bersamaannya perintah shalat dengan zakat, menunjukkan ke-Islam-an seseorang tidak sempurna tanpa menjalankan keduanya. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan vertikal dengan Allah Swt, sedangkan zakat adalah perwujudan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Pelaksanaan pemungutan zakat dan pendistribusian yang semestinya, secara ekonomi, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. Selain itu, zakat dapat pula mengekang lajunya inflasi. Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata-ekonomi seperti yang diinginkan.

Target utama dari aplikasi zakat adalah, mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Rasulullah sering menyebutkan target utama ini dalam banyak haditsnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz ketika ia diutus pergi ke Yaman untuk mengajarkan Islam bagi orang yang masuk Islam.

Baznas Kota Pekanbaru adalah institusi resmi yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara profesional sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang. Untuk sementara ini pengelolaan zakat di lembaga ini masih perlu dioptimalkan, karena sumber terbesar pemasukan Baznas Kota Pekanbaru, masih pada zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan zakat dari berbagai dunia usaha dan jasa belum terkelola.

Selanjutnya banyaknya sumber dana zakat yang belum terkelola oleh Baznas Kota Pekanbaru menyebabkan zakat belum berfungsi efektif dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq* zakat karena keterbatasan dana yang terkumpul dan belum maksimalnya pendistribusian zakat dalam bentuk program produktif. Untuk itu disarankan kepada, pertama; pengelola zakat, perlu adanya program yang jitu untuk meningkatkan ekonomis *mustahiq* zakat. Kedua; Kepada pemerintah terkait, perlu tekanan pemerintah kepada para pengusaha untuk mengeluarkan zakat mereka kepada Baznas. Ketiga; Para *Muzakki* seharusnya zakat dikeluarkan melalui Baznas, agar terkelola dengan menjadi dana yang optimal sehingga dapat didistribusikan dengan optimal pula.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin.

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat penulis rampungkan. Ucapan shalawat dan salam *allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*, penulis ucapkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah yang benar di sisi Allah Swt, sehingga penulis mempunyai pedoman hidup yang tepat.

Penulisan laporan penelitian dengan judul: EFEKTIFITAS UU. NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Terhadap Zakat dalam Memberdayakan Ekonomi *Mustahiq* Zakat di Kota Pekanbaru) ini adalah hasil penelitian dalam kegiatan penelitian dosen dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau tahun 2014.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih Rektor UIN Suska Riau, Direktur LPP, dan seluruh staf, Narasumber Bapak Dr. Nasharuddin, M. Ag, Bapak Muhammad Albahi, Saudara Riski Alwi serta isteri dan anak-anak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril ataupun meteril, selama berlangsungnya penelitian ini. Mudah-mudahan semua bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalasi dengan pahala yang setimpal di sisi Allah Swt. Amin.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa laporan penelitian ini belumlah dapat dikatakan sempurna, masih banyak terdapat kekurangan di sana sini, yang tentu memerlukan masukan dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaannya. Namun demikian, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca semuanya.

Pekanbaru, Desember 2014

Penulis,

H. Maghfirah, MA

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	21
 BAB II PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Efektifitas Hukum	23
B. Sinkronisasi Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat Menurut Aturan Perundang-undangan.....	26
C. Perspektif Fikih Islam tentang Amil yang Ditunjuk	55
D. Pengelolaan Zakat Secara Profesional	71
 BAB III ZAKAT DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
I. Tinjauan Teoritis tentang Zakat dalam Islam.....	83
A. Pengertian Zakat.....	83
B. Sejarah dan Dasar Hukum Zakat.....	89
C. Urgensi Zakat	93
D. Syarat Wajib Zakat.....	114
E. Harta yang Wajib Zakat	122
F. Pendistribusian Zakat	143

II. Zakat Menurut Perundang-undangan di Indonesia	154
A. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	154
B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	161
BAB IV UNDANG-UNDANG NO. 38/1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi di Baznas Kota Pekanbaru dalam Memberdayakan Ekonomi <i>Mustahiq-</i> nya)	
A. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru.....	163
B. Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Ekonomi <i>Mustahiq</i> -nya.....	169
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran-saran	174
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia mana pun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya. Besarnya perhatian Islam terhadap penanggulangan problema kemiskinan dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam sejak fajarnya baru menyingsing di Kota Makkah, saat umat Islam masih beberapa orang dan masih tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik, kitab suci al-Qur`annya sudah memberikan perhatian penuh dan kontinu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Rumusan al-Qur`an itu adakalanya merumuskan dengan kata-kata “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin”, serta ada pula kalanya dengan rumusan “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah”, memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan, membayar zakat”, dan rumusan-rumusan lainnya¹.

Surah al-Mudatstsir sebagai salah satu surat yang turun di awal risalah Islam, memperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa “orang-orang kanan” muslimin di dalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan pembohong-pembohong itu dicebloskan ke dalam neraka.

¹Yusuf al Qardhawi, *Fiqhu al Zakat*, Terj. Salman harun, dkk, *Fiqh Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), Cet. Ke-6, h. 50

Jawabannya adalah, orang-orang tersebut dicebloskan ke dalam neraka karena tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan. Firman Allah Swt dalam surah al-Mudatstsir [74]: 38-46:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾
عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا خَوْضٌ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيَوْمِ
الَّذِينَ ﴿٤٦﴾

“Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya, kecuali orang-orang di sebelah kanan, mereka berada di taman-taman surga saling bertanya tentang orang-orang durjana, “apakah sebabnya kamu dicebloskan ke dalam neraka?”, mereka menjawab, “Kami bukan golongan orang yang shalat, dan kami tiada memberi makan orang miskin. Kami asyik membicarakan kebatilan dengan orang yang berbuat kebatilan itu, dan kami mendustakan hari pembalasan”².

Dalam surah al Qalam [68] ayat 19-33 Allah juga menginformasikan hukuman bagi orang-orang yang mentelantarkan orang-orang miskin.

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٦٨﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٦٩﴾ فَتَنَادَوْا
مُصْبِحِينَ ﴿٧٠﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴿٧١﴾ فَانْطَلَفُوا وَهُمْ
يَتَخَفَتُونَ ﴿٧٢﴾ أَن لَّا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَّسْكِينٌ ﴿٧٣﴾ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ ﴿٧٤﴾
فَإِنَّمَا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٧٥﴾ بَلْ لَّحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٧٦﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴿٧٩﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٨٠﴾ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا

²QS. Al Mudatstsir [74]: 38-46

مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَٰعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

“Lalu kebun itu ditimpa bencana (yang datang) dari Tuhan-mu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. “pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya). Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata; “Sungguh kita benar-benar orang-orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Berkatalah orang yang paling bijak di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhan-mu). Mereka mengucapkan; “Maha Suci Tuhan kami, sungguh kami, adalah orang-orang yang zhalim”. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata; “Celakalah kita! Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas”. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik dari pada yang ini, sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah adzab (di dunia). Dan sungguh adzab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui”³.

Ayat-ayat yang turun di Makkah tidak hanya menghimbau agar orang-orang miskin diperhatikan dan diberi makan, serta mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu juga membebani setiap orang mukmin untuk mendorong pula orang lain agar memberi makan dan memperhatikan orang-orang miskin tersebut, Allah akan menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak menganjurkan, mendorong memberi makan orang-orang miskin. Firman Allah Swt:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلِّتَنِي لِمَ أُوتِيَ كِتَابِي ۖ ﴿٣٤﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي ۖ ﴿٣٥﴾ يَلِّتَهَا كَأَنَّ الْقَاضِيَ ۖ ﴿٣٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۖ ﴿٣٧﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِي ۖ ﴿٣٨﴾

³QS. Al Qalam [68]: 19-33

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا
فَأَسْلُكُوهُ ﴿٢٨﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ



“Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, “Alangkah baiknya jika kitabku (ini) tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dari ku”. (Allah Swt berfirman); “Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya”. Kemudian masuklah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian ikatlah ia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin⁴.

Dalam surah al-Ma`un ayat 1-3 juga disebutkan:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ
عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”⁵.

Kata *yahudh* “saling mendorong” dalam ayat di atas mengandung arti “bahu membahu”⁶. Dengan demikian ayat itu mengandung seruan agar masyarakat bertanggungjawab sepenuhnya secara kolektif dalam menangani kemiskinan.

⁴QS. Al-Haqqah [69]: 25-34

⁵QS. Al-Ma`un [107]: 1-3

⁶Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 53. Baca juga A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke-25, h. 274

Demikian sebagian kecil ayat yang dipakai al-Qur`an Makiyah dalam mendorong manusia agar memperhatikan dan memberikan hak-hak fakir miskin supaya mereka tidak terlunda-lunta. Cara-cara yang dipakai al-Qur`an di atas, yakni dengan cara memuji orang-orang yang berzakat dan mencerca orang-orang yang tidak menunaikannya.

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah. Untuk itu zakat yang termaktub dalam surah-surah Makiyah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, di mana *nishab* dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, serta negara bertanggungjawab mengelolanya⁷.

Zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, namun diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai, tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak lagi dari itu⁸.

Ketika masyarakat Islam sudah berada di Madinah, Islam merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, beban tanggungjawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, seperti adanya bentuk hukum-hukum yang mengikat, bukan hanya dalam bentuk pesan-pesan yang bersifat anjuran.

⁷Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 60

⁸*Ibid.*, h. 61

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam al-Qur'an, misalnya surah al-Baqarah [2]: 110, Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

“Dirikanlah olehmu shalat dan bayarkanlah zakat”...⁹.

Terdapat juga berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat dalam surah-surah yang lain. Surah yang sangat banyak membicarakan masalah zakat ialah al-Taubah.

Di dalam surah al-Taubah Allah memerintahkan:

1. Agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh. Kecuali bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat¹⁰.
2. Orang-orang yang menyemarakkan masjid adalah orang-orang yang mendapat restu Allah. Akan tetapi, restu Allah belum dapat diperoleh kendatipun sudah menyemarakkan masjid, sebelum beriman, mendirikan shalat, dan membayai zakat¹¹.
3. Allah mengancam penimbun-penimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak Allah¹².
4. Dalam surah al-Taubah, Allah memberikan instruksi kepada Rasul-Nya dan semua orang yang bertugas memimpin umat sesudah beliau, supaya memungut sebagian harta kekayaan orang-orang yang dipimpinnya¹³.

⁹QS. Al-Baqarah [2]: 110

¹⁰QS. Al-Taubah [9]: 5 dan 11

¹¹QS. Al-Taubah [9]: 18

¹²QS. Al-Taubah [9]: 34-35

Tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surah al-Maidah [5] ayat 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

“Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah)”¹⁴.

Zakat adalah syarat memperoleh pembelaan dari Allah sebagaimana yang sudah dijanjikan-Nya; Sungguh Allah hanya membela orang-orang yang membela-Nya, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Untuk itu orang-orang yang bila diberi Allah kekuasaan di atas bumi, harus mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang perbuatan mungkar. Kepada Allah-lah segala urusan kembali¹⁵.

Bersamaannya perintah shalat dengan zakat, menunjukkan ke-Islam-an seseorang tidak sempurna tanpa menjalankan keduanya. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan vertikal dengan Allah Swt, sedangkan zakat adalah perwujudan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Pelaksanaan pemungutan zakat dan pendistribusian yang semestinya, secara ekonomi, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. Selain itu, zakat

¹³QS. Al-Taubah [9]: 103

¹⁴QS. Al Maidah [5]: 55

¹⁵QS. Al Hajj [22]: 40-41

dapat pula mengekang lajunya inflasi. Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata-ekonomi seperti yang diinginkan¹⁶.

Target utama dari aplikasi zakat adalah, mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Rasulullah sering menyebutkan target utama ini dalam banyak haditsnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz ketika ia diutus pergi ke Yaman untuk mengajarkan Islam bagi orang yang masuk Islam. Sabda Rasul kala itu di antaranya ialah:

...فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَاءِهِمْ

“...Beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka”¹⁷.

Islam menginginkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada segelintir orang¹⁸, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Taubah [9] ayat 35:

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

¹⁶Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Intermasa, 1992), Edisi I, h. 248. Baca juga, Taqyudin an Nabhani, *An Nidham al Iqtishadi Fil Islam*, Terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), Cet. VI, h. 253-258

¹⁷Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Al-Tajrid al-Shahih li Ahadits al-Jami' Al-Shahih*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. VI, h. 282. Hadits ini juga dikutip Yusuf al Qardhawi, *Dauru al Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykhilaat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Nurita Lc, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. I, h. 30

¹⁸Taqyudin an Nabhani, *Op. cit.*, 272

“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”¹⁹.

Zakat juga merupakan salah satu ketentuan Allah menyangkut harta. Untuk itu Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapa pun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu “milik” (atas nama) ia yang menyia-nyiaikan itu karena tindakan penyalahgunaan akan merugikan semua pihak. Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan guna kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “pada mulanya” masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing²⁰.

5. Surah al-Taubah juga menjelaskan orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat.

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

¹⁹QS. Al Taubah [9]: 35

²⁰M. Quraish Shibab, *Membumikan al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet. XXI, h. 323

الْصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah”, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil*), para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²¹.

Dengan ayat ini Allah menghentikan keserakahan orang-orang yang serakah dan orang-orang yang rakus, serta menghentikan tindakan penyerahan distribusi zakat kepada kemauan sepihak orang-orang yang rakus dan serakah tadi. Zakat harus terpungut dan terdistribusi dengan baik, sehingga orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi dapat diangkat taraf ekonominya dan mampu keluar dari kemiskinan yang melilitnya.

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai bentuk penciptaan negara yang madani (*Baldatun thayyibatun warabbul*

²¹QS. Al Taubah [9]: 58-60

ghafur) sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah: “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²²

Oleh sebab itu, salah satu solusi alternatif dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak. Adapun golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) adalah *Fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil* dan *fisabilillah*. Keluarnya UU. No. 38 Tahun 1999 sekarang diperbaharui dengan UU. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan salah satu elemen pendukung dalam rangka manifestasi penanggulangan kemiskinan melalui pengaturan tentang pengelolaan zakat kedalam regulasi hukum positif di Indonesia.

Dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan, pengelolaan zakat bertujuan:

- (2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

²²Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

(3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Selanjutnya dalam pasal 3 UU. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru, pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Membaca tujuan zakat dalam undang-undang pengelolaan zakat baik dalam UU. No. 38 tahun 1999 ataupun UU. No. 23 tahun 2011, dapat ditegaskan bahwa adanya pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (para *mustahiq* zakat) serta penanggulangan kemiskinan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi efektif dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum ada tiga macam hal yang mempengaruhi berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya di dasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif.

Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

2. Penegakan Hukum

Institusi yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada di antaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

3. Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan²³.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang sudah dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ), sekarang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan sudah dilakukan seperti pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu, serta mendistribusikannya kepada para *mustahiq* lainnya²⁴. Hanya saja metoda ini belum dapat mengukur sudah sejauh

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. I, h. 31-37

²⁴H. Erman, (Sekretaris Umum Baznas Kota Pekanbaru), *Wawancara*, 11 Oktober 2014, di Pekanbaru

mana efektifnya cara tersebut dalam membebaskan si-*mustahiq* dari himpitan ekonomi yang menderanya. Misalnya tahun ini sudah berapa orangkah *mustahiq* yang sudah keluar dari status miskinnya? Pertanyaan ini belum dapat dijawab dengan data yang jelas²⁵.

Belum optimalnya fungsi zakat terutama di bidang produktif, juga diduga akibat dari perilaku *muzakki* yang selalu mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada orang yang mereka duga sebagai *mustahiq* zakat. Selanjutnya *muzakki* juga cenderung membagikan zakatnya kepada jumlah *mustahiq* yang banyak, akibatnya jumlah nominal yang diterima masing-masing *mustahiq* menjadi kecil. Jumlah yang kecil itu hanya dapat digunakan untuk konsumtif dan sangat tidak mungkin digunakan untuk usaha-usaha produktif, dalam usaha pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud Undang-undang tentang pengelolaan zakat.

Untuk mengetahui jawaban dari fenomena di atas, penulis berupaya untuk melakukan penelitian dengan judul: EFEKTIFITAS UU. NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Terhadap Zakat dalam Memberdayakan Ekonomi *Mustahiq* Zakat di Kota Pekanbaru)

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, permasalahan pokok yang dibahas dalam tulisan ini difokuskan kepada efektifitas zakat di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq*-nya menurut

²⁵Marabona, (Sekretaris I Baznas Kota Pekanbaru), *Wawancara*, 15 Desember 2012, di Pekanbaru

UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berangkat dari masalah pokok ini, berikut dapat dirumuskan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana efektifitas zakat di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq*-nya menurut UU. No. 38 tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui efektifitas zakat di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq*-nya menurut UU. No. 38 tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam. Khususnya pemberdayaan zakat sebagai salah satu potensi dalam meningkatkan taraf ekonomi para *mustahiq*-nya.
 - b. Sebagai bahan masukan berupa rujukan sebagai data pendukung atau bahan penelitian lanjutan bagi kalangan peneliti lainnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya menggesa perlunya pemberdayaan zakat secara ekonomi. Sehingga zakat

benar-benar mampu menjadi salah satu instrumen untuk pengentasan masalah ekonomi *mustahiq*-nya.

- b. Bagi para *muballigh-muballighah* diharapkan dapat lebih menekankan kepada para *muzakki*, dalam penunaikan zakat jangan hanya melepaskan “kewajiban” saja, tetapi menunaikan zakat harus mempunyai dampak secara ekonomi.

E. Metode Penelitian

a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis (*nondoktrinal*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini disebut juga dengan *sosio legal research*²⁶.

b. Spesifikasi

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan maksud memperoleh gambaran tentang efektifitas zakat dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq*-nya di Kota Pekanbaru. Seyogyanya zakat mampu memberdayakan ekonomi *mustahiq*-nya, karena telah lahirnya UU. No. 38 tahun 1999 serta telah diperbaharui dengan UU. No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan menggambarkan fakta dan data yang didapati di lapangan, tetapi

²⁶Zainuddin Ali, *Op. cit.*, 12-13

lebih dari itu penelitian menganalisis dan menginterpretasikan semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian ialah, karena di kota ini belum men-*tasharruf*-kan zakatnya secara optimal untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*-nya. Diduga UU. tentang pengelolaan zakat belum berjalan secara efektif.

d. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah para Pengurus BAZNAS, *Muzakki* serta para *Mustahiq* Zakat di Kota Pekanbaru. Sedangkan objeknya ialah efektifitas zakat di Kota Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq* zakat, analisis tentang optimalisasi pemberlakuan UU. tentang pengelolaan zakat.

e. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah para Pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru yang berjumlah 8 orang, diambil sampel 4 orang (50%), *Muzakki* dan *Mustahiq* zakat di Kota Pekanbaru. Para *muzakki* dan *mustahiq* ini tidak dapat diketahui jumlahnya secara pasti. Untuk itu untuk populasi *Muzakki* dan *mustahiq* itu ditetapkan sampel masing-masing sebanyak 100 orang.

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat

populasi yang sudah diketahui sebelumnya²⁷. *Purporsive sampling* disebut juga dengan sampel bertujuan, karena pengambilan sampel bukan atas dasar strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu²⁸. Misalnya karena jumlah populasi yang belum jelas, untuk itu pemilihan sampel dilakukan berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu pada subjek penelitian, termasuk alasan waktu, tenaga, dana dan atau tempat yang jauh. Contoh menetapkan seorang direktur perusahaan sebagai populasi dalam penelitian ini, karena diduga ia adalah *muzakki*, atau menetapkan seorang pemulung sebagai sampel, karena diduga ia sebagai *mustahiq*.

Cara ini pernah dipergunakan oleh Soejono Soekanto dalam penelitiannya mengenai; “Pengetahuan dan sikap kalangan hukum di Jakarta, terhadap hukum dan kependudukan”. Penentuan sampel dari “kalangan hukum” itu menggunakan teknik *purporsive sampling*”²⁹.

Tabel. I.1

Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah	Sampel
1.	Pengurus Baznas Kota	8	4
2.	<i>Muzakki</i>	Jumlah Pasti Tidak Diketahui	50
3.	<i>Mustahiq</i>	Jumlah Pasti Tidak Diketahui	50
	Jumlah		54

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. Ke-6, h. 106. Baca juga, S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke-7, h. 98

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-14, h. 183

²⁹Aminuddin dan Zainal Asikin, *Loc.cit.*

f. Sumber Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden, yaitu dari para pengurus BAZNAS, *muzakki* dan *mustahiq* zakat. Adapun data sekundernya diperoleh dari perpustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, serta unsur pemerintahan setempat.

g. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada di BAZNAS Kota Pekanbaru atau di tempat lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- d. Studi pustaka, yaitu penela'ahan mendalam terhadap berbagai tulisan para ahli yang berkompeten di bidang zakat, khususnya zakat yang dikaitkan sebagai salah satu potensi ekonomi umat Islam yang menjadi kajian dalam tulisan ini. Penelitian kepustakaan dalam studi ini memegang peranan yang sangat menentukan, karena merupakan bahan analisis data, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap objek kajian yang menjadi

titik fokus studi ini, termasuk untuk mempertajam pembahasan terhadap data yang diperoleh.

h. Teknik Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian dilakukan melalui kualitatif yuridis, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri. Teknik menggunakan analisis yuridis yaitu penganalisaan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum, dan mengkaitkan dengan norma, asas dan kaedah yang mengaturnya.

i. Metode Penulisan

Setelah data dianalisa, data tersebut penulis susun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan fakta khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif Analitik, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan kemudian dianalisa.

B. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan arah pembahasan yang jelas dalam tulisan ini, maka disusun sistematika pembahasannya, yakni sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- C. Latar Belakang Masalah
- D. Permasalahan dan Batasan Masalah
- E. Tujuan
- F. Kegunaan Penelitian
- G. Tinjauan Kepustakaan
- H. Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT

- A. Efektifitas Hukum
- B. Sinkronisasi Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat Menurut
Aturan Perundang-undangan
- C. Perspektif Fikih tentang Amil yang Ditunjuk
- D. Pengelolaan Zakat Secara Profesional.

BAB III KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

- A. Pengertian Zakat
- B. Urgensi Zakat
- C. Sejarah dan Dasar Hukum Zakat

D. Tujuan Zakat

E. Syarat Wajib Zakat

F. Harta yang Wajib Zakat

G. Pendistribusian Zakat.

BAB IV EFEKTITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA PEKANBARU

A. Sistem pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru

B. Efektifitas Zakat di Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Ekonomi

Mustahiq-nya Menurut UU. No. 38 tahun 1999

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

A. Efektifitas Hukum

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna³⁰. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya³¹.

Dalam konteksnya dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar.

Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda

³⁰Nurul Hakim, "*Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*", www.badilag.net.

³¹Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 24.

bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup³².

Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum³³.

Selanjutnya Soerjono Soekanto³⁴ mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut³⁵:

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);

19 ³²Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pres, 1996), hal.

³³*Ibid.*, hal. 20

³⁴*Ibid.*, hal. 53

³⁵*Ibid.*, hal. 57

- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja³⁶. Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu³⁷:

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Singkatnya hukum dikatakan efektif bila hukum tersebut dipatuhi serta berfungsi sesuai dengan nilai filosofis dan sosiologisnya.

³⁶Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 70.

³⁷*Ibid.*, hal. 72

B. Sinkronisasi Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat Menurut Aturan Perundang-undangan

Teori pemberlakuan hukum pada dasarnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Konstitusi negara yang dianut memungkinkan diberlakukannya hukum;
2. Pembentukan hukum atau Undang-undang;
3. Untuk melaksanakan hukum, perlu dibentuk institusi penegak hukum.

Keterpaduan antara konstitusi, Undang-undang, dan pelaksana Undang-undang merupakan syarat terbentuknya pelaksanaan dan penegakkan hukum³⁸.

Dalam sosiologi hukum terdapat teori yang menyatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat apabila:

1. Berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati (*dode regel*);
2. Berlaku secara sosiologis (hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya (teori kekuasaan) atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Apabila berlaku hanya secara sosiologis (dalam teori kekuasaan), hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa; dan

³⁸Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT Rajawali. 1982), hal. 13.

3. Berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi). Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*)³⁹.

Secara filosofis, dapat dijelaskan bahwa cita-cita hidup masyarakat adalah ingin menjadi masyarakat yang tertib (fisik), tenteram (psikis), dan sejahtera lahir dan batin. Hukum adalah instrumen untuk mencapai cita-cita tersebut. Cita-cita yang bersifat filosofis itu hanya dapat dicapai dengan jalan taat hukum. Oleh karena itu, penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum merupakan deviasi dari cita-cita filosofis masyarakat, Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia umumnya. Cita-cita mulia itu mesti dibuktikan dalam bentuk nyata, empiris-sosiologis. Dengan demikian, hukum akan dapat dikatakan hidup apabila diterima secara filosofis (dari segi cita-cita hidup tertinggi) dan sosiologis (dimengerti, diterima, dan ditaati oleh masyarakat); dan secara yuridis (kekuasaan politik memberi sanksi bagi yang melanggar hukum)⁴⁰.

³⁹Faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya/berfungsinya hukum adalah: 1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; 2) petugas/penegak hukum; 3) fasilitas yang mendukung pelaksanaan/penegakan hukum; dan 4) masyarakat/warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan/hukum. Lihat Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum*, hlm. 9 dan 13; sedangkan dalam sumber lain dijelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum adalah: 1) faktor undang-undang; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana/fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan. Lihat Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), hal. 3-53.

⁴⁰Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum*, *Op. cit.*, hal. 13; Penjelasan mengenai hukum yang hidup (*living law*) antara lain dapat dilihat dalam Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hal. 188-192

Teori kedua (setelah teori hukum hidup) adalah teori penegakan hukum⁴¹; sebab hukum yang hidup belum tentu tegak. Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi:

1. Materi hukum (pidana-perdata dan publik-privat);
2. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim); dan
3. Kesadaran hukum masyarakatnya, yaitu masyarakat Indonesia⁴².

Pada bagian ini dijelaskan mengenai substansi peraturan perundang-undangan tentang zakat dengan dua pendekatan: pendekatan substantif dan pendekatan ilmu perundang-undangan (*taqnin al-ahkam*).

1. Analisis Substansi Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ditinjau dari segi pertimbangan sosiologisnya terlihat bahwa zakat diyakini memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial; oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profesionalitas pengelolaan zakat akan semakin tinggi pula sumbangsih zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁴¹Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam penegakkan hukum diperlukan empat sumber daya: 1) sumber daya manusia (seperti hakim, polisi, jaksa, dan panitera); 2) sumber daya fisik (seperti gedung, perlengkapan, dan kendaraan); 3) sumber daya keuangan (seperti belanja negara dan sumber-sumber lain); dan 4) sumber daya lain yang dibutuhkan dalam menggerakkan organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Lihat Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru. t.th), hal. 18. Baca juga Harie Tiesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Restu Agung, 2009); Abdul Wahid dan Sunardi, *Quo Vadis Penegakan Hukum*, (Bandung: Tarsito. 1995); Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: CV Remadja Karya. 1988); dan Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa. 1979).

⁴²Kesadaran hukum merupakan terminologi ilmu hukum yang menyangkut domain sosialisasi dan internalisasi substansi hukum; sehingga kesadaran hukum suatu ketentuan hukum diketahui, dimengerti (baca: diakui), dihargai, dan ditaati. Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum*, hal. 216.

Pertimbangan sosiologis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
2. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam. Untuk itu bila masyarakat Islam Indonesia mampu dan hasil pengumpulan zakat, merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
4. Upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diungkapkan pula bahwa:

1. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang

mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat;

2. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat;
3. Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

4. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat;
5. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzakki* dan *mustahiq*, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha;
6. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola; dan
7. Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat *mustahiq*, dan meningkatnya profesionalitas pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Sedangkan pertimbangan yuridis Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); dan
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Ketentuan umum (Bab I) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas tiga bagian:

1. Definisi-definisi yang bersifat operasional,
2. Ketentuan yang mengatur *muzaki*, dan
3. Ketentuan yang mengatur kewajiban pemerintah.

Dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdapat enam definisi, yaitu:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat⁴³;

⁴³UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 1.

2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya⁴⁴;
3. *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat⁴⁵;
4. *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat⁴⁶;
5. Agama adalah agama Islam⁴⁷; dan
6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama⁴⁸.

Idealnya definisi operasi infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat juga dijelaskan dalam ketentuan umum; tapi definisi infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang, yaitu:

1. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
2. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

⁴⁴UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 2.

⁴⁵UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 3.

⁴⁶UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 4.

⁴⁷UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 5.

⁴⁸UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 6.

3. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;
4. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
5. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Ketentuan mengenai *muzakki* adalah bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat⁴⁹; dan ketentuan bagi pemerintah adalah bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat⁵⁰. Dalam penjelasan Undang-undang diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan yang

⁴⁹UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2.

⁵⁰UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3.

dimaksud amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Asas dan tujuan; asas pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945⁵¹. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat⁵².

Organisasi pengelola zakat; Bab III mengenai organisasi pengelolaan zakat terdiri atas enam bagian:

1. Ketentuan mengenai pembentukan Badan Amil Zakat,
2. Ketentuan mengenai bentuk hubungan Badan Amil Zakat secara hirarkis;
3. Unsur pengurus Badan Amil Zakat;
4. Organ Badan Amil Zakat;
5. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat;
6. Tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat; dan
7. Sifat pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Ketentuan mengenai pembentukan Badan Amil Zakat adalah:

⁵¹UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4.

⁵²UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 5.

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah⁵³;
2. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama;
3. Pembentukan Badan Amil Zakat daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi;
4. Pembentukan Badan Amil Zakat daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota; dan
5. Pembentukan Badan Amil Zakat kecamatan oleh camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama kecamatan⁵⁴.

Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Pemerintah Daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan; dan

⁵³M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa. 1987), hal. 733-778; dan lihat Taqiy al-Din Ibn Taimiah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr. Al-Hadits. t.th), hal. 45-72.

⁵⁴UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Kementerian Agama telah membuat pedoman mengenai sarana dan prasana Lembaga pengelola Zakat yang terdiri atas: 1) organisasi Lembaga Pengelola Zakat; 2) Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Lembaga Pengelola Zakat; dan 3) kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Lembaga Pengelola Zakat. Lebih lanjut lihat *Pedoman Pembukuan Sarana dan Prasana Lembaga pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005).

2. Badan Amil zakat tingkat kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa atau di kelurahan. Ketentuan mengenai bentuk hubungan Badan Amil Zakat secara hirarkis adalah bahwa Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif⁵⁵.

Sedangkan ketentuan mengenai unsur pengurus Badan Amil Zakat adalah bahwa pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu⁵⁶.

Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat; dan
2. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ketentuan mengenai organ Badan Amil Zakat adalah bahwa organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana⁵⁷.

Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa:

1. Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah;
2. Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan; dan

⁵⁵UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (3).

⁵⁶UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (4).

⁵⁷UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (5).

3. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ketentuan mengenai pengukuhan, tugas pokok, dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat adalah:

1. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah; dan
2. Lembaga Amil Zakat harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Menteri Agama⁵⁸.

Tugas pokok Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama⁵⁹. Sedangkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah bahwa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya⁶⁰.

Dalam penjelasan undang-undang diungkapkan bahwa:

1. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat; dan

⁵⁸UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

⁵⁹UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 8.

⁶⁰UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 9. Dalam rangka membina Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, Pemerintah pada tahun 2003 telah menerbitkan Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf sebagai upaya pengembangan pengelolaan zakat dan pemberdayaan wakaf di Indonesai. Isi profil tersebut adalah: 1) Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf; 2) kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf; 3) program kerja, 4) model-model pengelolaan zakat dan wakaf; dan 5) rencana strategis pengembangan. Lihat *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2003).

2. Agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdaya guna, Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain, yaitu penyuluhan dan pemantauan.

Kementerian Agama telah berusaha membuat pedoman untuk melakukan sosialisasi zakat yang dijadikan pedoman bagi para penyuluh yang terdiri atas sembilan seri:

1. Pola pengembangan zakat;
2. Metode penyuluhan yang terdiri atas:
 - a. Penyuluh (pejabat Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pakar);
 - b. Sasaran;
 - c. Metode penyuluhan;
 - d. Materi penyuluhan;
3. Fikih zakat;
4. Petunjuk bagi muzaki;
5. Pegangan da'i;
6. Pelatihan amil zakat atau pengurus BAZ/LAZ;
7. Pendayagunaan;
8. Sistem pengelolaan; dan
9. Himpunan materi penyuluhan.

Pengumpulan zakat; Bab IV tentang pengumpulan zakat terdiri atas:

1. Ketentuan mengenai obyek/harta yang dikenai zakat serta harta-harta lain selain zakat;
2. Metode/cara pengumpulan zakat;

3. Metode/cara penghitungan zakat; dan
4. Hubungan antara zakat dengan pajak.

Ketentuan mengenai obyek zakat adalah:

1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak dan uang,
 - b. Perdagangan dan perusahaan,
 - c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan,
 - d. Hasil pertambangan,
 - e. Hasil peternakan,
 - f. Hasil pendapatan dan jasa⁶¹, dan
 - g. Rikaz⁶².

Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa:

1. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya; dan
2. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang

⁶¹Wahbah al-Zuhaili telah menjelaskan argumentasi mengenai zakat yang obyeknya merupakan hasil ijtihad (bukan ditentukan oleh nash); antara lain zakat bangunan dan pabrik, zakat profesi, dan zakat wirausaha. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fanany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 273-275.

⁶²UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya idul fitri.

Ketentuan lain mengenai pengumpulan zakat adalah mengenai nishab; yaitu penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama⁶³. Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa:

1. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
2. Kedua, kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan; dan
3. Waktu pengeluaran zakat dapat terdiri atas *haul* atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan *Qomariah*, tahun *Qomariah*, panen atau pada saat menemukan *rikaz*.

Ketentuan mengenai metode/cara pengumpulan zakat adalah:

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*;
2. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*⁶⁴; dan
3. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat yaitu infaq, shadaqah, wasiat, waris, dan kafarat⁶⁵.

Dalam penjelasannya diungkapkan bahwa:

⁶³UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 ayat (3).

⁶⁴UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 12.

⁶⁵UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 13.

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
2. Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberi kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku *muzakki* untuk memungut zakat harta simpanan *muzakki* yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat.

Dalam penjelasan undang-undang juga diungkapkan bahwa:

1. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
2. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
3. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;
4. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
5. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Ketentuan mengenai metode/cara penghitungan zakat adalah:

1. *Muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama; dan
2. Apabila *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Badan Amil Zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya⁶⁶.

Ketentuan mengenai hubungan antara zakat dengan pajak adalah bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁷. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Selanjutnya diinformasikan pula bahwa:

1. Dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berlaku sekarang, kedudukan zakat sebagai pengurang terhadap pajak; dengan implikasi bahwa pemasukan pemerintah dalam sektor pajak dikurangi zakat; dan
2. Dalam rancangan undang-undang tentang pengelolaan zakat ditetapkan bahwa zakat berkedudukan sebagai pengurang harta yang akan kena pajak

⁶⁶UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

⁶⁷UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 14 ayat (3).

(bukan sebagai pengurang terhadap pajak secara langsung); oleh karena itu, diduga bahwa menggeser kedudukan zakat dari sebagai pengurang pajak, menjadi pengurang harta kena pajak, dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara melalui sektor pajak.

Pendayagunaan zakat; ketentuan mengenai pendayagunaan zakat adalah:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama;
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif⁶⁸; dan
3. Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif⁶⁹.

Penggunaan zakat atas nama *sabilillah* boleh di-*tasharruf*-kan untuk kegiatan usaha yang produktif yang telah didukung oleh ulama sebelum undang-undang tentang pengelolaan zakat diberlakukan, yaitu Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa pada tanggal 2 Pebruari 1982 telah memfatwakan tentang kebolehan men-*tasharuf*-kan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemashlahatan umum yang substansinya adalah:

1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif; dan

⁶⁸UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

⁶⁹UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 17.

2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh di-*tasharuf*-kan guna keperluan *mashlahah 'ammah* (kepentingan umum)⁷⁰.

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa:

1. *Mustahiq* delapan ashnaf ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *shabilillah*, dan *Ibn Sabil* yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam;
2. Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pengawasan; ketentuan mengenai pengawasan terhadap Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawas;
2. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota;
3. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat;

⁷⁰M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Zakata MUI: Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*, (Jakarta: Baznas dan MUI, 2011), hal. 13-14.

4. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik⁷¹;
5. Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya⁷²; dan
6. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat⁷³.

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;
2. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat; dan
3. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan zakat. Sanksi;

Ketentuan mengenai sanksi atas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah:

1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat merupakan pelanggaran yang diancam dengan hukuman

⁷¹UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 18 ayat (1)-ayat (4).

⁷²UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 19.

⁷³UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 20.

kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

2. Setiap petugas Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷⁴.

Ketentuan lain; ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

1. Dalam hal *muzakki* berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Amil Zakat Nasional⁷⁵; dan
2. Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, Pemerintah wajib membantu operasional Badan Amil Zakat⁷⁶.

2. Analisis Peraturan Zakat dari Segi Ilmu Perundang-undangan

Peraturan yang tertinggi dalam sebuah negara adalah konstitusi. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945. Secara teoritik dalam ilmu perundang-undangan, undang-undang dibedakan menjadi dua:

- a. Undang-undang yang menjadi induk setiap peraturan lainnya (konstitusi, undang-undang dasar, atau *Qanun Asasi*); dan

⁷⁴UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 21, ayat (1)-ayat (3).

⁷⁵UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 22.

⁷⁶UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 23.

- b. Peraturan perundang-undangan yang menginduk pada undang-undang dasar yang dibedakan berdasarkan obyek yang diaturnya⁷⁷.

Setiap negara memiliki peraturan sendiri dalam menentukan peraturan perundang-undangannya. Di Indonesia, urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 pasal 2 adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-undang;
- d. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu);
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden; dan
- g. Peraturan Daerah.

Dalam pasal 3 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 juga ditetapkan bahwa:

- a. Peraturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan Gubernur, disebut Peraturan Daerah Provinsi;
- b. Peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota, disebut Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Peraturan yang Dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa, disebut Peraturan Desa.

⁷⁷Di antara literatur yang mendukung adalah Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1996); Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius. 1998); dan Haposan Siallagan dan Efik YUSDiansyah, *Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Medan: UHN Press. 2008), hal. 34

Sementara itu dalam UU. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. UUD 45;
- b. Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan Daerah⁷⁸.

Peraturan daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh DPRD kabupten/kota bersama dengan bupati/walikota; dan
- c. Peraturan Desa atau setingkat yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya⁷⁹.

Sementara itu, dapat pula diinformasikan bahwa *qanun* hanya dibedakan menjadi dua:

- a. *Qanun pokok* (*qanun asasi* atau konstitusi) dan
- b. *Qanun ikutan* (*qanun taba'iyah*).

Selanjutnya *qanun taba'iyah* dibedakan lagi berdasarkan obyek yang diatur dan aspek internal-eksternal yang diatur. *Qanun* yang mengatur

⁷⁸UU Nomor 10 Tahun 2004, pasal 7, ayat (1).

⁷⁹UU Nomor 10 Tahun 2004, pasal 7, ayat (2).

obyek secara internal sebuah negara biasanya disebut *qanun dakhili*; sementara *qanun* yang mengatur obyek yang berhubungan dengan negara lain biasanya disebut *qanun khariji*. Dalam UU. tentang Pemerintahan Aceh *qanun* dibedakan secara hirarkis menjadi dua:

- a. *Qanun* yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh); dan
- b. *Qanun* kabupataen/kota yang disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota)⁸⁰.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal yang lazim dalam sebuah undang-undang adalah hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai kelanjutannya. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara tekstual tidak memerlukan Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai operasional dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga sekarang tidak pernah ada; yang ada adalah Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdapat empat hal yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama:

⁸⁰UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 7, ayat (2).

- 1) Persyaratan Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama⁸¹;
- 2) Susunan organisasi dan tata kerja badan Amil Zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama⁸²;
- 3) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama⁸³; dan
- 4) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan pemanfaatan untuk usaha produktif diatur dengan Keputusan Menteri Agama⁸⁴.

Tahapan berikutnya adalah Menteri Agama membuat keputusan, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kelihatannya keputusan tersebut masih diragukan kedudukannya oleh penegak hukum; karena pada umumnya pelaksanaan sebuah undang-undang dibentuk dalam Peraturan Pemerintah (misalnya: Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2006 tentang Wakaf), bukan dalam bentuk keputusan menteri. Oleh karena itu, pihak Kementerian Agama/Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, mengajukan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM)) Nomor:

⁸¹UU Nomor 10 Tahun 2004, pasal 7, ayat (2).

⁸²UU Nomor 10 Tahun 2004, pasal 10.

⁸³UU Nomor 10 Tahun 2004, pasal 15.

⁸⁴UU Nomor 10 Tahun 2004, pasal 16, ayat (3).

Dj.I/BA.03.2/5004/2002 tertanggal 19 Juli 2002 guna mendapatkan kepastian mengenai kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada akhirnya dikeluarkan surat jawaban dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: I.U.M.01.10-453 tertanggal 26 September 2002 perihal Pelaksanaan Undang-Undang tentang Zakat, yang menegaskan bahwa kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah sah karena kewenangan Menteri Agama untuk membuat peraturan ditentukan secara tegas dalam undang-undang; oleh karena itu, kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan peraturan perundang-undangan (*delegated regulation*), bukan sebagai aturan administrasi atau aturan kebijakan (*policy rules/beleidregels*)⁸⁵.

Keunikan kedua dari pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah jika dilihat dari segi kelaziman penempatan definisi; yaitu definisi operasional yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan ditempatkan pada bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdapat enam definisi, yaitu:

⁸⁵Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: I.U.M.01.10-453 tanggal 26 September 2002.

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat⁸⁶;
- 2) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya⁸⁷;
- 3) *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat⁸⁸;
- 4) *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat⁸⁹;
- 5) Agama adalah agama Islam⁹⁰; dan
- 6) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama⁹¹.

Sedangkan dari segi cakupan obyek yang dikelola oleh Badan Amil Zakat bukan hanya harta zakat, tapi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan juga bahwa Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, yaitu infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarat*⁹². Definisi operasional infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan

⁸⁶UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 1.

⁸⁷UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 2.

⁸⁸UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 3.

⁸⁹UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 4.

⁹⁰UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 5.

⁹¹UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1, angka 6.

⁹²UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 13.

kafarat dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

- 1) Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 2) Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 3) Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;
- 4) Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
- 5) Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 6) *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan langkah maju karena sebelumnya pengelolaan zakat diatur dengan peraturan di bawah undang-undang; yaitu:

- 1) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah;
- 2) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan
- 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah⁹³.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah berusaha mengefektifkan undang-undang tersebut antara lain dengan:

- 1) Membentuk Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 2) Membentuk Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/21 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
- 3) Diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); dan
- 4) Diterbitkannya Instruksi Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Lingkungan Kementerian Agama.

C. Perspektif Fikih Islam tentang Amil yang Ditunjuk

⁹³Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005), hal. 411-418.

Amil adalah salah satu institusi yang dijelaskan dalam Quran surah al-Taubah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁹⁴.

Informasi dari ayat di atas menegaskan bahwa amil zakat memiliki peran penting dalam melakukan peran “*intermediari*” antara pihak yang memiliki surplus harta (*Muzaki*) dengan pihak yang mengalami defisit harta/*mustadhafin* (*fakir, miskin, riqab, sabilillah, gharim, ibn sabil, dan mu'alaf*)⁹⁵.

1. Riwayat yang Mengharuskan Menyerahkan Zakat kepada Pemerintah

⁹⁴QS. Al-Taubah [9]: 60. yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁹⁵Penjelasan mengenai riwayat tentang ikhtilaf ulama mengenai keharusan menyerahkan zakat harta kepada pemimpin atau amil yang ditunjuknya disarikan dari Kitab al-Amwal. Lihat Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam, *Kitab al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Syuruq. 1989), cet. ke-1, hal. 675-683; dan lihat juga Ali Jum'ah Muhammad, *Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah li al-Masharif wa al-Mu'assasat al-Maliyah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Salam. 2010), vol. XVIII, hal. 717-773.

Dengan mengutip pendapat Ibn Sirin, Abu Ubeid menjelaskan bahwa: pertama, zakat pada zaman awal Islam diserahkan kepada Rasulullah atau kepada orang yang dipercayakan Rasulullah untuk mengelolanya (yang dimaksud orang yang dipercayakan Rasulullah untuk mengelola zakat adalah amil/amilin); kedua, pada zaman kekhalifahan Abu Bakar bahwa zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau kepada orang yang dipercaya untuk mengelolanya; ketiga, zakat diserahkan kepada khalifah Umar pada zaman kekhalifahannya atau kepada orang yang telah dilantik untuk mengelolanya; dan keempat, zakat diserahkan kepada Utsman pada zaman kekhalifahannya atau kepada orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya.

Ketika Utsman terbunuh, ulama berbeda pendapat sehingga berbeda dalam menyerahkan zakat. Di antara mereka ada yang masih menyerahkan zakat kepada para penguasa, dan ada juga di antara mereka yang membagikan zakat secara langsung, tanpa diserahkan kepada penguasa. Di antara orang yang masih menyerahkan zakat kepada penguasa adalah Ibnu Umar.

Ibnu Sirin menjelaskan bahwa apabila seseorang membagi zakat hartanya sendiri (tanpa melalui khalifah/amil), hendaklah dia bertakwa kepada Allah; janganlah mencela suatu kaum dengan cara apa pun; karena celaan itu dikhawatirkan akan menjadi pemicu lahirnya musibah yang sama atau lebih buruk dari tragedi yang telah terjadi. Sedangkan ulama lain, Ayub, menjelaskan bahwa akhir sirah tersebut adalah bahwa siapa saja yang membagikan zakat hartanya secara langsung, hendaklah ia bertakwa kepada

Allah dan janganlah dia menutup-nutupi harta yang semestinya dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, aspek kejujuran dalam menghitung sendiri akan harta yang dizakati merupakan aspek yang sangat penting.

Sirah yang diriwayatkan Ibn Sirin juga mendapat penguatan dari praktek penyerahan zakat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Saw yang lain, di antaranya Ummi Alqamah menjelaskan bahwa Aisyah Radhiyallah‘anha menyerahkan pembayaran zakat hartanya kepada pemimpin/khalifah.

Ulama kontemporer banyak mempertanyakan mengenai kualitas ketaatan umat kepada pemimpin yang melakukan penyimpangan (baca: tidak adil). Perdebatan ini berdampak juga terhadap pertanyaan: apakah zakat harta boleh diserahkan kepada khalifah/pemerintah yang melakukan penyimpangan? Suhail bin Abu Saleh meriwayatkan dari ayahnya mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut. Suhail bin Abu Saleh dari ayahnya, ia berkata, "saya pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Ibnu Umar. Lalu saya katakan kepada mereka, "sesungguhnya penguasa ini telah melakukan seperti apa yang telan kalian saksikan. Apakah saya harus menyerahkan zakat kepada mereka?" Seluruh sahabat itu menjawab, "Serahkan zakat hartamu kepada mereka!"

Ibnu 'Aun berkata, "Saya pernah bertanya kepada Mujahid mengenai zakat. Lalu ia berkata, "Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair berkata ketika dia sedang bertawaf bersama-sama kami, "sesungguhnya ada seorang lelaki pernah mendatangi Ibnu Umar membawa zakat hartanya. Lelaki itu berkata,

“Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah zakat hartaku. Lalu kemanakah saya harus menyerahkan dan meletakkan zakat hartaku ini?” Ibnu Umar menjawab, “serahkanlah zakat harta itu kepada orang yang telah engkau bai'at untuk menjadi penguasa.” Ibnu 'Aun telah menepukkan salah satu tangannya dengan lainnya. 'Ubaid bin 'Umair berkata sambil mengangkat kepalanya, "Saya tidak akan membagikan zakat harta ini." Ibnu Umar berkata, "serahkan zakat harta itu kepada sultan/penguasa!" Lalu Ubaid bin 'Umair berkata, "tidak. Akan tetapi letakkanlah ia sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu!".

Diskusi berikutnya dalam Kitab al-Amwal adalah mengenai kedudukan amil nonmuslim. Apakah boleh menyerahkan zakat kepada amil nonmuslim yang telah ditetapkan/dikukuhkan oleh pemerintah. Anas bin Sirin berkata, "pada suatu ketika saya bersama Ibnu Umar. Lalu ada seorang lelaki berkata, “apakah kami harus menyerahkan zakat harta kami ini kepada para amil zakat kita?” Ibnu Umar berkata, “ya.” Lelaki itu berkata, “sesungguhnya para amil zakat kita adalah orang kafir; karena Ziyad⁹⁶ (yaitu Ziyad bin Abihi) telah melantik orang kafir untuk menjadi petugas amil zakat” Lalu Ibnu Umar berkata, “janganlah kalian menyerahkan zakat harta kalian kepada orang-orang kafir.”

Riwayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pemerintah tidak diperkenankan mengangkat dan mengukuhkan amilin yang tidak beragama Islam; kalau toh pemerintah mengangkat/mengukuhkan amil yang

⁹⁶Ia adalah Ziyad bin Abihi. Dia termasuk salah seorang pemimpin dinasti Umayyah yang sangat masyhur

tidak beragama Islam, Ibn Umar menganjurkan agar zakat harta tidak diserahkan kepada amilin nonmuslim. Dengan demikian, pemerintah tidak cukup syarat untuk ditaati keputusannya.

Rabi' bin Ma'bid pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang fitnah yang terjadi sehingga zakat tidak tersalurkan kepada anak-anak yatim, “apakah zakat harus diserahkan kepada anak-anak paman mereka yang memerlukan?” Ibnu Umar menjawab, "tidak; tapi serahkan zakat harta itu kepada para penguasa." Ibnu Umar berkata, "selama para pemimpin itu masih menegakkan shalat, maka serahkanlah zakat harta itu kepada mereka."

Ibnu Umar berkata, "serahkan zakat harta itu kepada orang yang telah dilantik Allah sebagai pemimpin di kalangan kalian! Barang-siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barangsiapa yang melakukan perbuatan dosa, maka dosanya tetap akan kembali kepada dirinya sendiri juga."

Ibnu Umar berkata, "serahkanlah zakat itu kepada para penguasa!" Lalu ada seorang sesorang berkata kepadanya, "akan tetapi, para penguasa itu tidak menyerahkan zakat kepada para mustahak-nya." Ibnu Umar berkata, "Zakat harta tetap harus diserahkan kepadanya walaupun mereka tidak melaksanakannya secara baik."

Qatadah berkata, "saya pernah mendengar Abul Hakam berkata, “ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar dan lalu bertanya, ”bagaimana pendapatmu, kepada siapakah zakat harus diserahkan?” Ibnu Umar menjawab,

“serahkanlah kepada para penguasa, walaupun mereka memperebutkan dan menyantap daging anjing di meja makan mereka!”.

Qaz'ah berkata, "saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar, 'saya memiliki harta, lantas kepada siapakah saya harus menyerahkan zakatnya?' Ibnu Umar berkata, “serahkan saja kepada mereka (para penguasa). Saya berkata, “bagaimana kalau mereka akan menjadikan zakat harta itu hanya sebagai pakaian dan minyak wangi mereka saja?” Ibnu Umar berkata, "walaupun mereka akan menjadikannya hanya sebagai pakaian dan minyak wangi mereka; tetapi di dalam hartamu itu terdapat hak selain dari zakat.”

Qatadah berkata, "saya pernah bertanya kepada Sa'id ibnul Musayyab, “kepada siapakah saya harus menyerahkan zakat hartaku ini?” Sa'id bin al-Musayyab tidak memberikan jawaban kepadaku. Saya bertanya kepada Hasan. Hasan berkata, “serahkanlah zakat harta itu kepada penguasa!”

Abu Ubaid berkata, “kami melihat bahwa para ulama yang telah memerintahkan supaya menyerahkan zakat harta kepada penguasa, maka para ulama itu telah mewajibkan yang demikian itu kepada para pembayar jizyah. Hal ini seperti perkataan Ibnu Umar di atas, “serahkanlah zakat harta kepada orang yang telah engkau bai'at sebagai penguasa; dan kami telah menerangkan mengenai yang demikian.” Keterangan seperti ini juga telah dijelaskan oleh Ali dan Abu Hurairah, sebagaimana dalam hadits yang telah diriwayatkan dari kedua sahabat itu⁹⁷.

⁹⁷Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al Zabidi, *Al Tajrid al Dhahih li Ahadits al Jami' al Shahih*, Terj. Cecep Syamsul Hari, dkk, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. VI, 234

2. Riwayat yang Tidak Mengharuskan Penyerahan Zakat kepada Pemerintah

Riwayat yang Tidak Mengharuskan Penyerahan Zakat kepada Pemimpin Usamah bin Zaid dari ibunya yang berkata, “ayahmu pernah bertanya kepada Abu Hurairah tentang zakat? Lalu ia berkata, “apabila aku tidak memungut pajak dari mereka, niscaya aku tidak akan memberikan sesuatu sama sekali kepada mereka. Oleh sebab itu, janganlah engkau memberikan sesuatu kepada mereka!”.

Abu Hurairah pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang membawa zakat hartanya dan ia ingin menghadap pemimpin. Abu Hurairah berkata, "apa yang engkau bawa ini?" Orang itu menjawab, "ini adalah zakat hartaku. Aku akan menyerahkannya kepada pemimpin." Abu Hurairah bertanya, "apakah namamu ada di dalam diwan?" Lelaki itu menjawab, "tidak ada." Abu Hurairah lalu berkata, “jika demikian, maka janganlah engkau jangan sekali-kali meyerahkannya kepada mereka!”.

Ibnu Juraij berkata, “pada saat itu, Atha’ telah memberitahukan kepadaku yang substansinya bahwa ia telah menerima keterangan dari Ali mengenai adanya seseorang yang datang dan menghadap dia sambil membawa zakat hartanya. Lelaki itu berkata, “apakah engkau masih tetap mengambil jizyah kami?” Ali menjawab, “tidak.” Ali berkata lagi, “pergilah engkau; sebab aku tidak lagi memungut sesuatu darimu; kami juga tidak lagi mengumpulkan kekayaan atasmu, dengan syarat kami tidak lagi memberikan sesuatu kepadamu dan kami juga tidak memungut sesuatu darimu.”

Abu Sa'id ibn al-Maqbari berkata, "saya pernah mendatangi Umar ibn al-Khatthab lalu saya berkata kepadanya, "wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku; saya pernah membawakannya sebanyak dua ratus dirham. Lalu Umar berkata, "apakah engkau telah merdeka, wahai Kaysan?" Saya jawab, "ya," 'Umar berkata lagi: "Pergilah engkau dan bagikanlah harta zakatmu itu!".

Ibnu Juraij berkata, "saya pernah bertanya kepada Atha', "apakah engkau memberikan keringanan kepadaku bahwa aku dibolehkan menyerahkan zakat hartaku kepada para mustahak-nya, atau aku harus menyerahkannya kepada para pemimpin?" Atha' berkata, "apabila engkau telah menyerahkan zakat hartamu itu kepada para mustahak-nya dan engkau tidak memberikannya kepada salah seorang keluarga yang menjadi tanggung jawabmu, maka yang demikian itu diperbolehkan."

Ibnu Juraij berkata, "saya sering sekali mendengar perkataan dan pendapat itu dari Atha'." Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair dari ayahnya Ubaid bin 'Umair berkata, "bagikanlah zakat harta itu!" Hal yang serupa juga terdapat dalam riwayat dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari al-Hakam, dari Mujahid, dari Ubaid bin 'Umair."

Ja'far bin Burqan berkata, "saya pernah berkata kepada Maimin bin Mihran bahwa Ibnu Umar pernah berkata kepadaku, "serahkanlah zakat harta itu kepada para penguasa walaupun mereka akan menggunakannya sebagai minuman khamar!" Maimun berkata, "apakah engkau kenal Fulan al-Nashibi? Ia adalah sahabat karib Ibnu Umar. Al-Nashibi telah memberitahukan kepadaku

bahwa Ibnu Umar pernah ia tanya, “apa pendapatmu mengenai zakat jika para penguasa tidak menyalurkannya kepada para mustahiknya?” Ibnu Umar berkata, “serahkan zakat harta itu kepada mereka!” Al-Nashibi berkata lagi, “apa pendapatmu jika mereka mengakhirkan shalat dari waktunya, apakah engkau masih mau mengikuti shalat mereka?” Ibnu Umar menjawab, “tidak.” Al-Nashibi bertanya kembali kepada Ibnu Umar, ‘bukankah shalat itu sama dengan zakat?’ Ibnu Umar berkata, “mereka telah menipu kita, maka Allah telah menipu dan mengaburkan mereka sehingga tidak bisa lagi melihat kepada kebenaran.”

Menurut salah satu riwayat, Ibnu Umar telah menarik atau membatalkan pendapatnya yang menyatakan bahwa zakat harta mesti diserahkan kepada sultan atau pemimpin. Ibnu Umar berkata, "serahkanlah zakat hartamu kepada para mustahiknya secara langsung!"

Hassan bin Abi Yahya al-Kindi berkata, "saya pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai zakat. Sa'id bin Jubair menjawab, “serahkanlah zakat hartamu kepada para penguasa!” Kemudian saya bertanya lagi, “sesungguhnya engkau telah memerintahkan aku supaya menyerahkan zakat harta kepada para penguasa, sementara mereka sendiri telah menggunakan harta zakat secara tidak layak dan tidak pada tempatnya, bagaimana ini?” Lalu ia menjawab, “serahkanlah zakat hartamu kepada golongan yang telah Allah perintahkan!” Tadi engkau telah menanyakan masalah penyerahan zakat harta di tengah-tengah orang banyak, maka saya tidak memberitahukan jawaban yang sebenarnya.” Hal ini disebabkan kekhawatiran

Sa'id bin Jubair terhadap kebijakan politik para penguasa pada saat itu, sehingga dia tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya."

Ibrahim dan Hasan berkata, "serahkanlah zakat harta itu kepada para mustahiknya secara langsung dan sembunyikanlah masalah ini!" Maimun bin Mihran berkata, "rahasiakanlah zakat hartamu itu; kemudian serahkanlah kepada orang yang engkau kenal dari kalangan para mustahiknya; dan janganlah engkau simpan zakat harta itu sampai satu bulan, melainkan engkau harus membagikannya kepada para mustahiknya."

Hasan berkata, "apabila zakat harta diserahkan kepada penguasa, maka yang demikian itu dibolehkan dan sah. Apabila ia tidak diserahkan kepada penguasa, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah menyerahkannya kepada para mustahiknya. Jangan sampai engkau memberikan zakat harta itu berdasarkan kepada sistem nepotisme!"

Ibnu Sirin berkata, "siapa saja yang ingin membagi zakat hartanya secara langsung, hendaklah dia bertakwa kepada Allah; dan janganlah dia menyimpan zakat hartanya sehingga tidak lagi membayar zakat!"

Humaid berkata, "saya pernah berkata kepada Hasan, 'ada seseorang yang mengeluarkan zakat hartanya. Apabila ia melihat ada orang yang berhak menerimanya, maka dia memberikannya.' Hasan berkata, "janganlah engkau menjadikan zakat hartamu itu sebagai pelindung bagi sipemilik; yaitu setiap kali ada orang yang berhak menerimanya, maka dia menyimpannya!" Abu Ubaid berkata, "seluruh atsar yang telah kami sebutkan, yaitu penyerahan zakat harta kepada para penguasa dan kemudian membagikannya secara

langsung merupakan pendapat yang mesti dianut dan diaplikasikan. Penyerahan zakat yang demikian hanya boleh dilakukan pada zakat emas dan perak secara khusus. Apabila pemilik emas dan perak menyerahkan zakat hartanya kepada penguasa atau membagikannya sendiri, maka yang demikian sudah bisa dikatakan bahwa ia telah menunaikan kewajiban membayar zakat harta yang telah diwajibkan atasnya." Inilah pendapat yang kami anut dan kami tarjih; sebab ia adalah pendapat ahlu sunnah dan pendapat para ulama dari kalangan ulama Hijaz, ulama Irak dan lainnya dalam penyerahan zakat emas dan perak. Kaum muslimin telah diamanahkan supaya membayar zakat emas dan perak berdasarkan kesadaran masing-masing. Hal ini sebagaimana kaum muslimin telah diamanahkan supaya melaksanakan shalat berdasarkan kesadaran tentang amanah yang diembannya.

Adapun zakat binatang ternak, biji-bijian, dan buah-buahan, mesti diserahkan kepada para pemimpin/penguasa. Pemilik harta tidak boleh menyerahkan zakatnya selain kepada pemimpin. Apabila pemilik membagikannya sendiri dan menyerahkan kepada para mustahiknya sesuai dengan yang telah digambarkan oleh Quran, maka ia tetap dianggap belum membayar zakat. Pemilik tetap dituntut untuk menyerahkan kembali zakatnya dalam sektor binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian; sebab terdapat sunnah dan berbagai atsar yang telah memisahkan antara sektor binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian dengan sektor emas dan perak.

Alasannya antara lain adalah sikap khalifah Abu Bakar yang mewajibkan jihad kepada kaum Muhajirin dan Anshar serta mendeklarasikan

perang atas orang-orang murtad karena mereka telah enggan membayar zakat binatang ternak. Akan tetapi, Abu Bakar tidak mengeluarkan kebijakan seperti itu kepada orang yang enggan membayar zakat emas dan perak. Demikian juga apabila seorang muslim menyerahkan zakat hartanya kepada pengumpul cukai. Lalu dia menerimanya, maka menurut pendapat kami ia sudah dianggap sah; sebab pengumpul zakat merupakan petugas yang telah diperintahkan oleh pemimpin.

Anas bin Malik dan Hasan berkata, "apa saja yang engkau berikan di atas jembatan dan lintas perbatasan, maka ia dinamakan zakat harta yang sah." Isma'il berkata, "maksudnya adalah penyerahan zakat harta yang dilakukan di perbatasan dan kemudian diambil oleh pengumpul cukai, maka yang demikian itu sudah dianggap telah melakukan zakat;" Ibrahim, berkata, "hitunglah ke dalam bagian zakat hartamu mengenai apa saja yang telah diambil oleh para pengumpul cukai darimu!"

Al-Sya'bi berkata, "apa saja yang telah diambil oleh pengumpul cukai, maka hitunglah ke dalam bagian pengeluaran zakat hartamu!" Habib bin Juray berkata, "saya pernah bertanya kepada Abu Ja'far bin Ali tentang harta yang diambil oleh pengumpul cukai. Lalu ia menjawab, "hitunglah ke dalam bagian pengeluaran zakat hartamu!"

Ibnu 'Aun berkata, "saya pernah bertanya kepada Hasan mengenai harta yang telah diambil oleh pengumpul cukai, 'apakah saya boleh menghitungnya ke dalam bagian zakat harta?' Dia menjawab, ya." Abu Ubaid berkata, "menurut pendapat kami, inilah pendapat yang semestinya

diamalkan dan digunakan; walaupun ada sebagian di antara ulama yang berpendapat berbeda dengan pendapat tersebut."

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ja'far bin Burqan; menurutnya, Maimun bin Mihran pernah mengatakan bahwa apa yang telah diambil oleh petugas pengumpul cukai, tidak boleh dimasukkan ke dalam bagian pengeluaran zakat." Menurut Abu Ubaid, pendapat yang *rajih* adalah pernyataan yang telah ditegaskan oleh Anas, Hasan, Ibrahim, al-Sya'bi, dan Muhammad bin Ali. Pendapat inilah yang telah dianut oleh mayoritas para ulama, sehingga sebagian ulama membolehkan penyerahan zakat harta kepada golongan Khawarij.

Nafi menjelaskan bahwa di antara kaum Anshar bertanya kepada Ibnu Umar mengenai zakat. Ibnu Umar menjawab, "serahkanlah zakat harta itu kepada para amil." Lalu mereka berkata, "kadang-kadang penduduk menang dalam memperebutkan kekuasaan dan kadang-kadang mereka mengalami kekalahan." Ibnu Umar berkata, "serahkan zakat harta itu kepada orang yang menang dalam meraih kekuasaan!"

Riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa zakat harta boleh diserahkan kepada penganut aliran *al-Haruriyah* (Khawarij) dan sudah dianggap sah, maka riwayat ini tidak bisa dipastikan dari riwayat Ibnu Umar; Ibnu Syihab telah memursalkan kepadanya. Kemudian Ibnu Syihab sendiri kurang percaya dan bahkan tidak yakin bahwa riwayat itu berasal dari riwayat Ibnu Umar. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa pada akhir riwayat tersebut, yaitu "*wallahu a'lam.*"

Adapun riwayat Ibnu Umar ketika dia ditanya tentang penduduk Syam dan lainnya. Lalu ia berkata, "serahkanlah zakat harta kepada orang yang menang dalam kekuasaan," maka ini tetap diperbolehkan; sebab seluruh kelompok yang bertikai antara penduduk Irak dan penduduk Syam serta penduduk Hijaz pada saat itu adalah sama-sama mengajak kepada kepemimpinan bangsa Quraisy. Sedangkan, golongan Khawarij tidak termasuk ke dalam golongan Bangsa Quraisy⁹⁸."

Adapun perkataan ulama Irak yang mengatakan bahwa apabila datang kelompok Khawarij ke dalam rumah seseorang dan mereka memungut zakat harta, maka yang demikian itu telah dianggap sah. Sebaliknya, apabila seseorang datang kepada kelompok Khawarij dan menyerahkan zakat harta kepada mereka, maka yang demikian itu dianggap tidak sah dan mesti mengulangi pembayaran zakatnya.

3. Pendapat Imam Mazhab tentang Penyerahan Zakat kepada Pemimpin

Dalam hal penyerahan zakat melalui imam/khalifah/ pemimpin, amil yang diunjuk oleh imam/khalifah/pemimpin, atau muzaki menyerahkan langsung kepada tujuh ashnaf yang dijelaskan dalam Quran, ulama menjelaskan pendapatnya secara lebih rinci yang dapat dilihat pada bagian berikut.

- a. Apabila harta yang kena zakat itu termasuk benda tersembunyi atau tidak terlihat dari sudut pandang masyarakat pada umumnya seperti emas, perak, dan barang dagangan yang disimpan di gudang, pemilik dibolehkan

⁹⁸*Ibid.*

menyerahkan/membagikan zakatnya secara langsung kepada imam/amil yang ditunjuk imam, atau kepada mustadh'afin yang ditetapkan dalam Quran; sedangkan apabila kekayaan muzaki sangat melimpah yang dapat menyulitkannya dalam penunaian zakat, maka penyerahan zakat diserahkan langsung oleh pemiliknya kepada pemimpin/imam; karena imam dapat dianggap sebagai wakil dari mustadh'afin; di samping itu, pemimpin lebih tahu kepada siapa zakat itu harus diberikan.

- b. Apabila harta yang menjadi obyek pajak termasuk harta yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya (seperti hewan ternak, tanaman, buah-buahan, serta harta yang dapat dilihat oleh pemungut zakat, zakat harta-harta tersebut menurut jumhur ulama (Hanafiah dan Malikiyah) harus dibayarkan melalui imam/khalifah/pemimpin atau amil yang ditunjuk olehnya. Apabila pemiliknya menyerahkan zakatnya sendiri kepada mustadh'afin, maka zakatnya tidak sah berdasarkan QS 9: 103.
- c. Ulama Malikiyah mendiskusikan mengenai kualitas keberagaman imam/khalifah/pemimpin; apabila pemimpinnya seorang yang adil, zakat wajib diserahkan kepadanya atau amil yang ditunjuknya; akan tetapi, jika pemimpinnya tidak adil (baca: kualitas keberagamaannya rendah atau sangat rendah) sedangkan muzaki tidak bisa melepaskan diri dari pengaruhnya, maka sebagian zakatnya boleh diserahkan kepadanya; sedangkan jika muzaki mampu melepaskan diri dari pengaruhnya, muzaki boleh menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustadh'afin; sangat dianjurkan bahwa penyaluran zakatnya tidak langsung oleh muzaki, tetapi

menunjuk pihak lain (wakil) karena jika muzaki menyerahkan zakat secara langsung kepada mustadh'afin, dikhawatirkan muzaki akan meminta dipuji oleh para mustahik zakat.

- d. Imam al-Syafi'i dalam *qawl jadid*-nya berpendapat bahwa muzaki boleh menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahik, baik zakat atas harta yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya maupun zakat atas harta yang tidak tampak.
- e. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzaki dianjurkan menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung kepada mustahik, baik zakat atas harta yang kelihatan oleh masyarakat pada umumnya maupun zakat atas harta yang tidak tampak agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah sampai/diterima oleh *mustahiq*⁹⁹.

D. Pengelolaan Zakat Secara Profesional

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Banyak shahabat Rasulullah saw yang meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw memohon perlindungan Allah Swt dari kemiskinan. Apabila kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berbahaya, tentulah Rasulullah saw tidak berlindung atasnya. Sabda Rasulullah saw itu di antaranya diriwayatkan oleh 'Aisyah ra, yaitu:

⁹⁹Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Jilid. III, h. 415

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ
فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ... وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra; Rasulullah saw selalu berdo’a, “Ya Allah

aku berlindung kepada-Mu dari fitnah api neraka dan siksa api neraka.

Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kemiskinan”. (HR. Bukhari)¹⁰⁰.

Lebih jauh Imam Manawy dalam kitabnya *Faidhul Qadir*, sebagaimana yang dikutip Yusuf al Qardhawi, menyebutkan bahwa ada keterkaitan kuat antara kemiskinan dengan kakafiran. Seseorang yang miskin, pada umumnya menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Di sisi lain sifat dengki mampu melenyapkan semua kebaikan¹⁰¹.

Dari fenomena di atas, Islam sangat berkepentingan untuk mengkonsentrasikan upaya pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Melepaskan manusia dari cengkeraman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan diri. Sehingga, bisa beribadah kepada Allah Swt dan juga mampu mengemban beban kehidupan, serta menjaga diri dari segala cengkaman sesuatu yang diharamkan, termasuk segala tipu daya.

Dengan tujuan di atas inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantunya dalam menutupi

¹⁰⁰*Ibid*, h. 868-869

¹⁰¹Yusuf al Qardhawi, *Dauru al Zakat fi 'Ilaaj al Musykilaat al Iqtishaadiyyah*, Terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. I, h. 26

kebutuhan materi; seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis (menikah), di mana para ulama menetapkan bahwa pernikahan salah satu cara untuk dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan, serta meningkatkan kemampuan berpikir¹⁰².

Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, serta turut membangun tatanan masyarakat. Selain itu, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat. Di mana satu sama lain saling menjaga dan saling menaungi, mereka pun berhak mendapatkan bantuan yang terhormat dari pemerintah, tanpa disertai dengan celaan dan rasa sinis. Bantuan inilah yang lebih bisa diterima oleh jiwa dan juga lebih terhormat, bahkan penuh dengan kemuliaan. Karena, mereka mendapat bagian dari haknya yang telah terukur dan juga dari bagian yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam al Dzariat ayat 19, yang berbunyi:

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم.

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”¹⁰³.

Dalam surah al Taubah ayat 60, lebih tegas disebutkan Allah:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang-orang fakir...”¹⁰⁴.

¹⁰²*Ibid.*, h. 27, Baca juga, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. VI, h. 457

¹⁰³QS. Al Dzariat [51]: 19

¹⁰⁴QS. Al taubah [9]: 60

Firman Allah ini menginformasikan bahwa dalam harta benda yang dimiliki seseorang, sesungguhnya telah dititipkan Allah Swt bagian yang telah menjadi hak bagi orang-orang yang miskin yang meminta-minta dan hak orang-orang miskin tetapi tidak meminta-minta. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bila seseorang menunaikan zakatnya, untuk kemudian diberikan kepada orang fakir miskin, itu bukan berarti karena orang tersebut telah jadi dermawan, akan tetapi harta yang dizakatkannya tersebut adalah hak si fakir miskin yang sudah seharusnya ia berikan.

Lebih jauh Allah menjelaskan seseorang yang telah menyedekahkan sebagian hartanya, supaya tidak menyebut-nyebutnya, karena itu akan menghilangkan pahalanya, di samping akan membuat si penerima menjadi sakit hati, hal ini dinyatakan Allah dalam surah al Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْإِذَا كَالَّذِي يَنْفَقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَادًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi bersihlah (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”¹⁰⁵.

Perasaan fakir miskin bukanlah perasaan yang dianggap tidak ada dalam masyarakat. Untuk itu seyogyanya komunitas masyarakat memperhatikan mereka dan menjaganya demi pembentukan kepribadian dan juga kehormatannya.

Sesungguhnya tugas manusia di muka bumi ini dan juga demi kehormatannya di hadapan Allah adalah mengharuskannya untuk tidak

¹⁰⁵QS. Al Baqarah [2]: 264

meninggalkan fakir miskin yang telah melupakan diri mereka sendiri dan juga Tuhannya, yang tidak memperdulikan agama dan dunianya serta membuatnya tidak peduli terhadap keadaan orang lain; karena sesungguhnya yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa mengganjal perut, menutup auratnya dan memperoleh tempat berteduh.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Namun perlu digarisbawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat yang lain adalah membantu Negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang muslim itu sendiri; sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berutang untuk dapat berbuat baik serta membantunya *istiqamah* dalam kebaikan¹⁰⁶.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Di mana hal ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak terpukau oleh permukaan yang tampak. Rasulullah sering menyebutkan tugas pertama ini dalam banyak haditsnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz di saat ia diutus pergi ke Yaman, yaitu:

¹⁰⁶Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 30

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: ... فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.: Nabi Muhammad saw mengutus Mu’adz ra., ke Yaman dan berpesan kepadanya: “... Beritahu mereka bahwa Allah memerintah mereka membayar zakat dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”¹⁰⁷.

Selanjutnya, zakat adalah lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat. Ketika itu belum dikenal “asuransi”. Asuransi baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941, di mana ditandatanganinya perjanjian Atlanta antara Inggris dengan Amerika dalam kewajiban untuk merealisasikan jaminan kehidupan bermasyarakat bagi setiap individu. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sejak munculnya ajaran Islam, zakat sudah menjadi rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dan menjadi landasan dasar ajaran Islam¹⁰⁸.

Latar belakang lahirnya asuransi di negara Barat , disebabkan agar berperangan yang terjadi ketika itu dapat terus dilakukan dengan memberikan jaminan kepada anak-anak dan isteri-isteri orang-orang yang terlibat dalam berperangan. Sedangkan latar belakang yang membidani kelahiran zakat bukanlah karena adanya revolusi dari para buruh atau fakir miskin, melainkan lebih didasari kepada perintah Allah agar senantiasa memperhatikan orang-rang miskin¹⁰⁹.

Zakat bukan sekedar bantuan sementara bagi fakir miskin yang setelahnya mereka ditinggalkan, dan kembali kepada kefakiran, sebagaimana asuransi yang

¹⁰⁷Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al Zabidi, *Op. cit.*, h. 282

¹⁰⁸Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 53

¹⁰⁹*Ibid.*

hanya merupakan bantuan sesaat. Setelah bantuan diberikan, asuransi tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan orang yang telah diberikan bantuan. Disyariatkannya zakat oleh Allah dan Rasul-Nya adalah bantuan permanen dan terorganisir. Konsep Islam tentang zakat menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip Yusuf al Qardhawi menyebutkan, perwujudan zakat mampu memenuhi kebutuhan seumur hidup dan membuat seorang fakir menjadi kaya untuk selamanya. Perwujudan zakat seperti inilah yang telah dipraktikkan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah.

Diriwayatkan dari Abu Ubaid dalam kitab *Amwal*, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al Qardhawi dalam bukunya, disebutkan; “Di tengah siang Umar berada di bawah pohon, lalu seorang wanita badui hendak menanyakan keberadaan *Amirul Mukminin* kepada orang-orang, hingga kemudian ia pun mendatangnya dan berkata: “Aku adalah wanita miskin, aku mempunyai banyak anak. Sesungguhnya *Amirul Mukminin* Umar bin Khattab telah mengutus Muhammad bin Musallamah sebagai petugas penarik dan pengumpul zakat di daerah kami. Namun ia tidak memberikannya kepada kami; semoga engkau mau merekomendasikan kami untuk menemui *Amirul Mukminin*”! Lalu Umar berteriak: “Yarfath (nama pembantunya) panggil Muhammad bin Musallamah”. Lalu wanita itu berkata: “Sesungguhnya ini berkaitan dengan kebutuhanku. Biarkan aku yang berbicara dengannya”. Lalu Umar berkata: “ *Insyallah*, ia akan melakukan tugasnya”. Lalu Yarfath mendatangnya dan berkata: “Baiklah...”. Kemudian Muhammad bin Musallamah pun datang dan berkata: “Salam bagimu wahai *Amirul Mukminin*”. Wanita itu malu melihatnya. Lalu Umar berkata: “Demi

Allah, betapa aku sangat selektif dalam memilih orang terbaik di antaramu. Apa yang akan kau katakan apabila engkau diminta pertanggung jawaban oleh Allah tentang ini?" Air mata Muhammad mulai menetes. Lalu Umar kembali berkata: "Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi-Nya kepada kita dan kita pun telah meyakini dan mengikuti semua ajaran yang disampaikan-Nya. Beliau beramal dan bekerja sesuai dengan perintah Allah dan menjadikan zakat sebagai hak orang miskin hingga Allah mengangkatnya ke hadirat-Nya, lalu Allah menggantikan posisinya dan menjadikan Abu Bakar khalifah setelahnya. Ia lalu mengerjakan semua sunnah Rasulullah saw hingga Allah mengangkatnya ke hadirat-Nya. Lalu aku menggantikannya dan aku memilih orang terbaik di antaramu... sesungguhnya tugasmu sebagai utusan untuk mendistribusikan zakat tahunan. Aku tidak tahu, mungkin sebaiknya aku tidak mengutusmu..."Kemudian Umar mendatangkan unta untuknya dan memberikan tepung dan minyak. Lalu berkata padanya: "Ambillah ini hingga kami datang ke Khaibar. Sesungguhnya kami akan mendatangnya..."Lalu Umar pun mendatangi wanita tersebut di Khaibar dan memberikan untuknya dua unta lainnya. Lalu ia berkata: "Ambillah ini, sesungguhnya di dalamnya terdapat satu perintah hingga datang kepadamu Muhammad bin Musallamah. Aku telah memerintahkannya untuk memberikan hakmu setiap tahunnya dan untuk tahun pertamamu"¹¹⁰.

Pada kisah di atas dapat dilihat, bahwasanya Umar memberikan wanita badui itu seekor unta yang membawa tepung dan minyak, lalu disusul dengan dua ekor unta lainnya. Pemberian tersebut belum cukup, sehingga Muhammad bin

¹¹⁰Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 55-57

Musallamah memberikan haknya selama dua tahun; tahun yang lalu dan tahun saat itu. Kisah ini menginformasikan bahwa zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif saja atau untuk mencukupi kebutuhan sesaat, tetapi lebih kepada upaya produktif.

Untuk itu peranan zakat, selain sebagai ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keseimbangan ekonomi, sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketenteraman¹¹¹.

Kelima rukun Islam: *Syihadat*, shalat, zakat, puasa dan haji memiliki hubungan yang terkait erat antara satu sama lainnya. Kelimanya terakumulasi pada dua hubungan yaitu secara vertikal dengan Allah (*Habl min Allah*), dan secara horizontal dengan sesama manusia (*Habl min Nas*). Kedua hubungan tersebut dilambangkang dengan ketentuan ibadah shalat dan zakat. Shalat tiang agama, zakat tiang sosial kemasyarakatan yang apabila tidak dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan agama, sungguh akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi.

Zakat dalam kedudukannya sebagai instrumen sosial ekonomi/elemen perekonomian memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian negara. Aspek inilah yang digambarkan dalam sejarah peradaban Islam mulai dari khalifah Abu Bakar yang telah meletakkan aturan dasar pelaksanaan, regulasi,

¹¹¹M. Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: MIzan, 1989), h. 141

dan sistem dalam pemungutan zakat, sampai pada khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah melengkapi aspek-aspek pengelolaan zakat, sebagai sebuah sistem yang aplikatif dalam menghasikan rujukan ekonomi¹¹².

Penghimpunan dan pengelolaan zakat harus memperhatikan dan menempatkan: pertama, zakat merupakan investasi sosial yang investasinya harus memperhatikan aspek-aspek halal dan *thayyib*, lokal *source*, *bottom up*, ramah lingkungan, dan kebutuhan pasar; kedua, pengelola zakat harus memiliki karakter social enterpreneurship/wirausaha; dan ketiga, karakter manajemen; pengelolaan dengan proses yang benar dan baik.

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan menjadi empat: 1) konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup; 2) konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa; 3) produktif tradisional; zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi seperti sapi dan mesin jahit; dan 4) produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha¹¹³. Pada prinsipnya penyaluran dana zakat diselaurkan dengan dua pola: pola tradisional (konsumtif) dan pola pemberdayaan (produktif).

¹¹²Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Center for Entrepreneurship Development [CED], 2005), hal. 33-35.

¹¹³Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press. 1998), hal. 61-64.

Pola tradisional (konsumtif) adalah penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti para orang tua (jompo), dan orang cacat. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; sesuai dengan penjelasan Undang-undang yang menjelaskan mustahik yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, peyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, dan orang yang terlilit utang.

Pola kontemporer (produktif) adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang menerima penyaluran dana untuk aktivitas suatu usaha/bisnis; yaitu penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target perubahan keadaan penerima (*mustahik/mustadh'afin*) dari kondisi kategori lemah (*mustadh'afin*) menjadi kategori *muzakki*.

Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua Dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi. Khalifah Umar juga pernah menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahik* yang sudah rutin meminta zakat padanya. Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi

sebagai pembayar zakat. Tahun berikutnya ternyata orang ini datang bukan meminta zakat tetapi menyerahkan zakat. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk Bantuan dana produktif, yang diperuntukan bagi *mustahiq* yang memiliki Wirausaha. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan akan mudah dilaksanakan jika model penghimpunan dana zakat dihimpun dan dikelola melalui amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat telah memicu lahirnya pengelolaan zakat secara profesional.

BAB III

ZAKAT DALAM ISLAM DAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

I. Tinjauan Teoritis tentang Zakat dalam Islam

Pengertian Zakat

Zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari زكى yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan dan baik¹¹⁴. Sesuatu itu زكى berarti tumbuh dan berkembang, selanjutnya seseorang dapat disebut *zaka* bila orang itu baik.

Imam Abu Luwis al Ma'lufi, mendefenisikan zakat secara bahasa dengan:

F. ¹¹⁵ الزكاة هو النماء والصلح والصدقة والطهار والزائدة

“Zakat berarti; Tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian dan bertambah”.

Menurut Yusuf al Qardhawi, semua makna zakat di atas digunakan dalam bahasa al-Qur`an maupun hadits, dan yang terkuat di antaranya berarti bertambah dan tumbuh¹¹⁶. Hal tersebut memberikan informasi bahwa mengeluarkan zakat akan memperoleh berkah, menumbuhkan kembangkan harta yang ada, membersihkan harta yang dizakatkan dan diri *muzakki*, serta memberikan dampak kebaikan baik pada *mustahiq*-nya maupun *muzakki* sendiri.

¹¹⁴Fu'ad Bustani, *Munjid al Tullab*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1986), h. 287, Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 577-578, Lihat juga, Mahmud Syalthut, *Min Tanjihat al Islam*, (Kairo: Dar al Qalam, 1966), h. 106

¹¹⁵Abu Luwis al Ma'lufi, *Munjid fi al Lughah*, (Mesir: Al Syarkiyah, 1925), h. 303

¹¹⁶Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Hadits*, Terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), Cet. Ke-6, h. 34

Selanjutnya Dr. Yusuf al Qardhawi dalam *Fiqh al Zakat* menyebutkan secara terminologi zakat bermakna; “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”¹¹⁷.

Dalam Kitab *al Fiqh ‘ala Mazahib al Arba’ah*, Abdurrahman al Jaziri mendefenisikan zakat menurut istilah adalah: “Penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu”¹¹⁸.

Ulama mazhab Hanafi, Malik, Syafi’i dan Ahmad, sebagaimana ditulis dalam Ensiklopedi Hukum Islam¹¹⁹ mengartikan zakat dengan:

- a. Ulama mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan; “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala”.
- b. Ulama mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan; “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang”.
- c. Ulama mazhab Syafi’i, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat ialah; “sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu”, dan
- d. Ulama mazhab Hanbali, menyebutkan zakat ialah; “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula”.

¹¹⁷Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al Zakat*, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1991), Juz. I, h. 37

¹¹⁸Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ‘ala Mazahib al Arba’ah*, (Beirut: Dal Ihya’, t.th), Jilid. I, Cet. Ke-3, h. 590, Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Beirut: Dar al Kitab al ‘Arabi, 1973), Cet. Ke-2, h. 327

¹¹⁹Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jild. 6, h. 1985

Berpijak dari berbagai pendapat di atas, kecuali ulama mazhab Syafi'i, definisi zakat yang dikemukakan hanya zakat mal saja, dan tidak termasuk zakat fitrah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa zakat mal ialah; kewajiban mengeluarkan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula".

Kadar yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat. Bila dihubungkan dengan pengertian etimologi di atas, maka harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah banyak, menjadi lebih berarti dan melindungi kekayaan *muzakki* dari kebinasaan. Sedangkan arti tumbuh dan suci ditujukan pada harta yang dizakatkan dan jiwa *muzakki*, sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surah al Taubah [9] ayat 103:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها... (التوبة : 103)

"Ambillah shadaqah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"...¹²⁰

Kata *shadaqah* dalam ayat di atas, mempunyai makna zakat, kendatipun digunakan bahasa *shadaqah*. Kata *shadaqah* yang bermakna zakat juga digunakan Allah Swt dalam firmanNya yang lain, di antaranya:

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
(التوبة: 58)

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah"¹²¹.

¹²⁰QS. Al Taubah [9]: 103

¹²¹QS. Al Taubah [9]: 58

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة الله والله عليم حكيم (التوبة: 60)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil*), para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹²².

Pengertian ini sama dengan sabda Rasulullah yang menggunakan kata *shadaqah* untuk menyebutkan kewajiban zakat, sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu ‘Ashim al Dhahhak ibn Makhlad dari Zakaria ibn Ishaq dari Yahya ibn Abdillah bin Shaifiy ibn Ma’bad dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi saw mengutus Mu’az ke Yaman dan bersabda:

أعلمهم الى شهاده ان لا اله الا الله وإنى رسول الله, فإن هم أطعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطيعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياءهم وترد على فقراءهم (رواه البخاري)¹²³

“Ajaklah mereka bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya adalah Rasulullah, jika mereka patuh, terangkan kepada mereka bahwa Allah menfardhukan shalat lima waktu sehari semalam dan jika mereka mentaatinya terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka”.

Dalam hadits lain Rasulullah juga bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلعم: ليس فيما دون خمس أوق صدقة, وليس فيما دون خمس ذود صدقة, وليس دون خمسة أوق صدقة (رواه البخاري)

¹²²QS. Al Taubah [9]: 60

¹²³Ibn Hajar al Asqalani, *Fath al Bari bi Syarh al Bukhari*, (Kairo: Dar al Rayyan al Turats, t.th), Juz. III, h. 307. Baca juga Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al Zabidi, *Al Tajrid al Shahih li Ahadits al Jami’ al Sahahih*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholin Anis, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. Ke-6, h. 284

“Diriwayatkan dari Abu Said al Khudri r.a.: Rasulullah saw pernah bersabda, “Tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima *uqiyah* (perak) dan tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima unta dan tidak ada zakat yang dikeluarkan jika tidak lebih dari lima *wasq*”. (HR. Bukhari)¹²⁴.

Semua ayat dan hadits di atas adalah tentang zakat, walaupun diungkapkan dengan istilah *shadaqah*. Terdapat pula istilah *mushaddiq* untuk sebutan *amil*, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata *shadaqah* itu disalahartikan oleh sebagian orang, yaitu hanya diartikan sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal itu tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa Arab pada zaman al Qur'an turun¹²⁵. Kata *shadaqah* sesungguhnya berasal dari kata *shidq*¹²⁶ yang berarti benar.

Yusuf al Qardhawi mengutip pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi, yang mempunyai pendapat mengapa zakat dinamakan *shadaqah*. Beliau menyebutkan; “Kata *shadaqah* berasal dari kata *shidq*, artinya benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan”¹²⁷.

Dengan kata lain, *shadq* bermakna, “terwujudnya sesuatu oleh sesuatu, atau membantu terwujudnya sesuatu itu”. Contoh di antaranya ialah *shidaq* “mahar” buat perempuan, yaitu terwujudnya dan diakuinya kesahan hubungan suami isteri dengan diterimanya mahar dan terlaksananya perkawinan menurut tata cara tertentu.

¹²⁴Ibnu Hajar al Asqalani, *Loc. Cit.*

¹²⁵Yusuf al Qardhaqi, *Op. cit.*, h. 38

¹²⁶A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke-25, h. 770

¹²⁷Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 38

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan *tasrif* katanya. Banyak kata *shaddaqa* dalam berbicara, berarti “benar”, bentuk kata *tashaddaqa* dalam hal kekayaan, berarti “dizakatkan”, dan bentuk *ashdaqa* kepada perempuan, berarti “membayar mahar” perempuan tersebut. Perubahan *tasrif* tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua dengan akar kata *shadaq* dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu; bahwa orang yang yakin akan adanya hari kebangkitan, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir, memburu dunia, dan tidak peduli dengan akhirat¹²⁸.

Oleh karena itulah Allah menggabungkan kata “memberi” dengan “membenarkan” dan “kikir” dengan “dusta” dalam firmanNya:

فاما من اعطى واتقى, وصدق بالحسنى, فسنيسره لليسرى, واما من بخل واستغنى, وكذب باحسنى, فسنيسره للعسرى.

“Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan)”¹²⁹.

Dengan demikian berzakat ataupun bersedekah berarti bukti “kebenaran” iman dan “membenarkan” adanya hari kiamat.

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹QS. Al Lail [92]: 5-10

Berargumentasi kepada firman Allah Swt dan hadits Rasulullah saw, serta ilmu tata bahasa Arab di atas, dapat dipahami kendatipun Allah dan Rasul menyebutkan kata *shadaqah* dalam firman dan sabdanya tersebut, akan tetapi yang dimaksud adalah zakat. Penggunaan kata *shadaqah* yang berasal dari kata *shidq* (benar) untuk penyebutan zakat, menginformasikan bahwa zakat yang dibayarkan seorang muslim adalah bukti pembenaran bahwa muslim tersebut telah mengaktualisasikan keyakinan agamanya.

Sejarah dan Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat pada dasarnya sudah disyari'atkan Allah Swt kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Al Qur'an mengungkapkan, bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Musa dan ahli kitab umumnya, juga telah melaksanakan zakat¹³⁰. Akan tetapi dalam penerapannya, zakat ketika itu belum menjadi kewajiban, namun masih sebatas suatu anjuran, untuk membangun rasa solidaritas dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Baru dalam syari'at Islam, zakat ditetapkan sebagai suatu kewajiban, karena Islam melihat dalam segala dimensi ruang dan waktu umat manusia selalu dihadapkan pada kenyataan adanya masalah kemiskinan yang menjadi masalah sosial yang perlu mendapat perhatian orang-orang kaya melalui zakat¹³¹, yang dalam pelaksanaannya perlu dikelola oleh suatu badan (amil) yang berwenang untuk mengumpulkannya serta mendistribusikan dengan benar.

¹³⁰QS. Al Anbiya' [21]: 73, QS. Maryam [19]: 31 dan 55, QS. Al Baqarah [2]: 83, QS. Al Maidah [5]: 12, serta QS. Al Bayyinah [98]: 5. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam syari'at nabi-nabi terdahulu telah diperintahkan untuk berzakat.

¹³¹Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1987), h. 114

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibandingkan dengan ajaran agama apapun, baik dari segi arahan, pengaturan maupun penerapannya. Sejak al Qur'an diturunkan di Makkah, masalah ini sudah banyak disinggung, seperti disebutkan bahwa pemberian makan fakir miskin adalah manifestasi iman¹³², ada pula yang berupa dorongan dan tidak jarang dalam bentuk ancaman agar orang-orang miskin betul-betul diperhatikan¹³³, seperti yang termaktub dalam surah al Ma'arif ayat 19-25, yaitu:

إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم. (المعارج 25-19 :)

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)¹³⁴.”

Pada periode Makkah, perintah zakat dalam al Qur'an masih bersifat anjuran dan penanaman kesadaran kepada kaum muslimin untuk memperhatikan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ketika itu, komunitas muslim masih sedikit jumlahnya dan selalu mendapat ancaman dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga pelaksanaan zakat bersifat pribadi-pribadi dan sangat hati-hati, sebab pada waktu itu zakat dapat diketahui sebagai ancaman

¹³²Lihat QS. Al Mudatstsir [74]: 38-46, dan QS. Al Qalam [68]: 19-33

¹³³Lihat QS. Al Haqqah [69]: 30-34

¹³⁴QS. Al Ma'arij [70]:19-25

sistem riba, serta berbagai bentuk penipuan dan kejahatan ekonomi lainnya yang berkembang di kalangan *musyrik* Makkah¹³⁵.

Di periode Madinah, zakat sudah menjadi sebuah kewajiban mutlak (*ilzami*), karena pada masa itu orang Islam sudah menjadi suatu komunitas yang memiliki eksistensi, wilayah dan pemerintahan tersendiri. Ketika itulah zakat diaplikasikan dengan baik dan dijelaskan harta-harta yang harus dizakati, syarat-syarat wajib zakat, besarnya jumlah yang harus dikeluarkan, sasaran pen-*tasharruf*-nya dan badan yang bertugas untuk mengatur serta mengelolanya¹³⁶.

Ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah zakat, secara umum terdapat dalam ayat-ayat Madaniah, antara lain seperti yang terdapat dalam surah al Baqarah ayat 43:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة : 43)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”¹³⁷.

Surah al Maidah ayat 12:

... لَنُنَاقِمَنَّكَ الصَّلَاةَ وَاتِّيمَ الزَّكَاةَ وَأَمَتُمْ بِرَسُولِي ... (المائدة : 12)

“... Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Ku...”¹³⁸

Dilihat dari segi bahasa, teks ayat-ayat tentang zakat, sebagian besar dalam bentuk *amar* (perintah) dengan menggunakan kata *atu* (tunaikan) yang berarti

¹³⁵Abdurrahman Qadir, *Zakat, dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 50

¹³⁶Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Zakat, Op. cit.*, h. 62

¹³⁷QS. Al Baqarah [2]: 43

¹³⁸QS. Al Maidah [5]: 12

berketetapan, segera, sempurnakan sampai akhir, kemudahan, mengantar, dan seorang yang agung¹³⁹. Kata *atu* juga bermakna *al I'tha*, yakni suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan¹⁴⁰. Dalam surah al Taubah ayat 103 Allah menginstruksikan kepada RasulNya untuk memungut zakat:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها... (التوبه : 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”¹⁴¹

Kata *min*, dalam ayat 103 surah al Taubah di atas, memberikan informasi bahwa “sebagian dari harta kekayaan diwajibkan (zakat)”. Sedangkan kata *amwalihim*, meliputi berbagai jenis harta dari orang “kaya”. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang memungut zakat itu adalah kepala negara atau orang yang dutunjuk untuk itu¹⁴². Rasulullah saw juga menjelaskan kedudukan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Hal ini tercermin pada waktu Makaikat Jibril bertanya tentang apa itu Islam, sebagaimana riwayat berikut:

أنه سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الاسلام فقال أن لا اله الا الله وإنى رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع سبيلا (وراه المسلم)¹⁴³

“Bahwa sesungguhnya ia (Jibril) bertanya kepada Nabi saw tentang Islam, Nabi menjawab: Yaitu dengan bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah utusan Allah, kemudian mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu”.

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar disebutkan:

¹³⁹Al Ashfahani, *al Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Beirut: Dar al Ma'rifat, t.th), h. 9

¹⁴⁰Abdurrahman Qadir, *Op. cit.*, h. 45-46

¹⁴¹QS. Al Taubah [9]: 103

¹⁴²Yusuf al Qardhawi, *Musykilat al Farq wa Kaifa 'Alajaha al Islam*, (Kairo: Maktabah Wahdah, 1980), h. 62-67

¹⁴³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: maktabah wa Mathba'ah al Masyhad al Husaini, t.th), Juz. I, h. 154

عن ابن عمر رضي الله عنهما, قال رسول الله صل الله عليه وسلم : بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتائ الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخارى)¹⁴⁴

“Dari Ibnu Umar ra., Ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Islam itu dibangun atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan puasa pada bulan Ramadhan”.

Di samping perintah menunaikan zakat, Rasulullah juga memberikan *warning* memerangi orang-orang mampu tetapi enggan berzakat, sebagaimana sabda beliau:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ومن قالها عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه, فقال والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة (رواه مسلم)¹⁴⁵

“Berkata Rasulullah saw: Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai ia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, barang siapa yang berkata demikian, akan dilindungi harta dan jiwanya, kecuali dengan hak-hak Islam suatu sebab dan dengan perhitungan. Dan dia berkata: “Demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat”.

Pernyataan “perang” terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, sebagaimana pernyataan hadits di atas, telah dipraktekkan Abu Bakar Shiddiq selaku khalifah pertama. Ia tidak segan-segan menumpas orang-orang yang mengira hanya Nabi Muhammad saw saja yang berhak memungut zakat¹⁴⁶.

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari pembayaran zakat, zakatnya dapat diambil secara

¹⁴⁴Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Istambul: Dar al fikr, t.th), Juz. I, h. 9

¹⁴⁵Imam Muslim, *Op. cit.*, Juz 2, h. 32

¹⁴⁶Setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar al Shiddiq terpilih sebagai khalifah pertama, yang ditandai dengan adanya *bai'ah al Saqifah*. Di antara usaha pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

paksa¹⁴⁷. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang mutlak.

Urgensi Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk menunaikannya. Penunaian zakat bukan atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa dapat dilakukan dengan “tekanan penguasa”. Oleh karena itu, agama menetapkan ‘*amil*’ atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan menunaikan zakat.

Dalam al Qur’an terdapat 30 kali kata zakat dalam bentuk yang *defenitif*, 27 kali di antaranya beriringan dengan kata shalat, seperti yang terdapat dalam surah al Baqarah ayat 43:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة : 43)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat serta rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”¹⁴⁸.

Bersamaannya perintah shalat dengan zakat, menunjukkan keislaman seseorang tidak sempurna tanpa menjalankan keduanya. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan vertikal dengan Allah Swt, sedangkan zakat adalah perwujudan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Pelaksanaan pemungutan zakat dengan semestinya, secara ekonomi, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, selain itu dapat pula mengekang lajunya

¹⁴⁷Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 333

¹⁴⁸QS. Al Baqarah [2]: 43

inflasi. Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata-ekonomi seperti yang diinginkan¹⁴⁹. Zakat adalah salah satu sarana, dalam usaha Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada segelintir orang¹⁵⁰.

Dalam kitab *Fiqh al Zakah*, Yusuf al Qardhawi menyebutkan tiga aspek tujuan zakat; pertama, tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi (*muzakki*); kedua, tujuan zakat yang dihubungkan kepada si penerima (*mustahiq*), dan ketiga tujuan yang dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Tujuan Zakat Bagi *Muzakki*

Tujuan Islam mengatur zakat bukanlah untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang lemah yang kurang beruntung dari segi ekonomi, tetapi tujuan utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Untuk itu tujuan adanya perintah zakat sama pentingnya baik terhadap si pemberi ataupun si penerima.

Dalam al Qur'an Allah Swt menyebutkan tujuan zakat adalah *tathhir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan). "Ambillah olehmu dari harta mereka zakat, yang membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. 9: 103). Karenanya, tujuan zakat bagi *muzakki* ialah:

¹⁴⁹Muhammad Abdul Mannan, *Loc. Cit.*

¹⁵⁰Taqyudin an Nabhani, *Op. cit.*, 272

a. Zakat Mensucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si Muslim, semata karena menurut perintah Allah Swt dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.

Sifat kikir yang tercela itu, merupakan tabiat manusia, yang dengan sifat kikir itu manusia diuji, karenanya Allah Swt, menanamkan cara-cara untuk menghilangkan tabiat dan watak itu. Manusia digiringNya untuk bekerja dan meramaikan bumi ini, sehingga timbullah rasa keinginan untuk memiliki, keinginan pada sesuatu benda dan keinginan untuk tetap memiliki selamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir terhadap apa yang ada pada dirinya, lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain, sebagaimana firman Allah Swt:

وكان الإنسان قتورا (الإسراء : 100)¹⁵¹

“... Dan adalah manusia itu sangat kikir”.

Dalam surah yang lain Allah Swt juga menegaskan:

ان الإنسان خلق هلوعا (المعارج : 19)¹⁵²

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir”.

Manusia yang tinggi nilainya atau manusia mukmin, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan keimanannya. Tidak ada

¹⁵¹QS. Al Israk [17]: 100

¹⁵²QS. Al Ma'arij [70]: 19

kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat, kecuali dengan berusaha menghilangkan sifat kikir yang tercela itu. Kikir adalah penyakit berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, terkadang orang yang mempunyai sifat itu mau mengorbankan jiwanya, menjual kemuliaan agama dan mengkhianati negaranya.

Allah Swt berfirman:

... ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (الحشر : 9)¹⁵³

“... Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Zakat dalam hubungan ini berfungsi mensucikan, artinya mensucikan si pemilik harta dari keburukan sifat kikir yang merusak. Sucinya orang itu ditentukan oleh kemurahan dan pemberiannya, ditentukan oleh kegembiraannya pada waktu mengeluarkan, ditentukan pula oleh kegembiraan ketika mengeluarkan harta, semata karena Allah.

b. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, zakat pun mendidik agar si Muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Di antara nilai pendidikan yang termuat dalam zakat adalah, tumbuhnya kebiasaan untuk saling memberi dan menyisihkan sebagian harta ataupun nikmat yang telah diperolehnya. Seorang muslim akan bersiap-siap untuk berinfak dan mengeluarkan zakat tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, uang dan harta

¹⁵³QS. Al Hasyar [59]: 9

perdagangannya. Bila datang Ramadhan, mereka pun akan bersiap-siap mengeluarkan zakat fitrahnya.

Setelah itu, orang yang siap menginfakkan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain, menyerahkan miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dan memberikan kebaikan dalam rangka kemaslahatan umatnya, adalah sangat jauh sekali dari mengambil harta orang lain, baik dengan cara merampas maupun dengan cara mencurinya.

Allah Swt bersumpah dalam surah al Lail ayat 1-7 untuk memberikan jalan termudah bagi orang-orang yang gemar memberikan hartanya di jalan Allah:

والليل إذا يغشى (1) والنهار إذا تجلى (2) وما خلق الذكور والأنثى (3) إن سعيكم لشتى (4) فأما من أعطى واتقى (5) وصدق بالحسنى (6) فسنيسره لليسرى (7)¹⁵⁴

(1) “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), (2) dan siang apabila terang benderang, (3) dan penciptaan laki-laki dan perempuan, (4) sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (5) Adapun yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, (6) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (7) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

Surah al Lail di atas adalah surah Makkiah pertama yang memberikan informasi akan sikap Islam terhadap harta dan orang kaya, serta menjelaskan pula contoh akhlak yang diperintahkan Islam, yang akan mendapat ridha Allah Swt.

c. Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bakhil, maka ia akan siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kotoran sifat kikirnya, sebagaimana

¹⁵⁴QS. Al Lail [92]: 1-7

firman Allah; “dan adalah manusia itu sangat kikir”. Dengan demikian, manusia itu akan menghampiri sifat sempurnanya Allah, karena salah satu sifat Allah adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

Kesempurnaan kekuatan berpikir, tergantung kepada mengagungkan perintah Allah; dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Allah mewajibkan zakat adalah agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, berbuat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan mereka, berusaha menghilangkan segala kesalahannya.

Di antara akibat dari akhlak dermawan serta ruh berbuat kebajikan yang ditumbuhkan oleh Islam pada setiap jiwa si Muslim melalui zakat, adalah sedekah jariah yang dikeluarkan oleh Muslim yang baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

d. Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syari’at, bahwa pengakuan dan syukur terhadap nikmat itu merupakan sesuatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya

makna syukur kepada Allah Swt, pengakuan akan keutamaan dan kebaikanNya, karena sesungguhnya Allah Swt senantiasa memberikan nikmat kepada hambaNya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

Di antara hal yang perlu dipikirkan dan dirasakan secara mendalam oleh pikiran dan perasaan kaum muslimin ialah bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat, sehingga setiap nikmat itu mesti diikuti dengan zakat oleh manusia, apakah nikmat itu bersifat materi atau rohani, zakatilah mata dan penglihatan, zakatilah ilmu, zakatilah keberhasilan anak dan sebagainya. Rasulullah saw bersabda sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardhawi, yakni:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلعم لكل شيء زكاة (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah ra., menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Segala sesuatu itu ada zakatnya”. (HR. Ibnu Majjah)

e. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Di sisi lain, zakat merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat. Zakat merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Tenggelam kepada cinta dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya

syariat zakat, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan berlebih-lebihan terhadap harta. Dengan demikian zakat diharapkan mampu menjadi obat yang tepat, guna mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah mengingatkan manusia, bahwa harta itu hanyalah sekedar alat, bukan tujuan. Allah Swt mengizinkan manusia mengumpulkan harta, membolehkan kehidupan dunia yang baik, akan tetapi tidak mengizinkan bila manusia berhenti dalam kehidupan dunia saja, karena ia diciptakan dalam tujuan yang tinggi dan mulia serta tempat yang abadi. Dunia diciptakan untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan untuk akhirat dan untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Dunia adalah jalan untuk mencapai akhirat. Tidak mengapa manusia berhias dengan jalannya itu, akan tetapi jangan lupa bahwa ia berjalan dengan suatu sasaran dan berbuat untuk tujuan.

Keberadaan harta pada manusia bukanlah pertanda akan keutamaan dan kebajikannya. Pertanda utama dan baik itu, apabila harta diserahkan kepada Allah, diinfakkan pada jalanNya dan mencari keridhaanNya. Sesungguhnya harta dalam pandangan Islam adalah kebaikan dan nikmat, tetapi dengan kebaikan itu, manusia akan diuji, sebagaimana ia diuji dengan keburukan. Firman Allah: “Kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah”. (QS. 21: 35). “Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian”. (QS. 64: 15). Sesungguhnya manusia jika diuji oleh Tuhannya, maka dimuliakanNya dan diberiNya nikmat”. (QS. 57: 7).

Dengan zakat berarti melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia, dengan mempersiapkan jiwa untuk menyerahkan harta, semata karena menuruti perintah Allah dan mencari ridha-Nya.

f. Zakat Mensucikan Harta

Zakat, sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa, juga ia mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.

Terhadap makna yang semacam ini, Yusuf al Qardhawi mengutip ungkapan ulama salaf yang menyebutkan:

الحجر المنصوب في الدار رهن بخرابها

“Batu hasil rampasan di dalam rumah, melepaskannya harus dengan cara menghancurkannya”.

Keterikatan hak si lemah dan si fakir dengan harta orang kaya, adalah merupakan keterikatan yang erat, sehingga sebagian fuqaha, sebagaimana dikutip Yusuf al Qardhawi, berpendapat bahwa zakat itu berkaitan dengan zatnya harta, bukan pada tanggung jawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya harta dihadapkan pada kerusakan dan kekurangan, selama belum dikeluarkan zakatnya.

Mensucikan harta pribadi dan jamaah dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali dengan melaksanakan hak Allah dan hak fakir, yaitu zakat.

g. Zakat Mengembangkan Harta

Zakat mampu mengembangkan dan memberkahkan harta. Hal ini dianggap aneh oleh sebagian manusia, karena zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak.

Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengurangan yang bersifat zahir itu, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit, yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.

Dengan hal ini, kita melihat sebagian pemerintah yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada sebagian pemerintah yang miskin, bukan karena Allah, tetapi karena ingin menumbuhkan kekuatan yang mendukungnya. Apabila dilihat dengan kejernihan pandangan, maka akan terlihat bahwa satu dinar di tangan seseorang, akan menggetarkan hati untuk mencintainya dan menggerakkan bibir untuk memintanya, dan mengeratkan tangan untuk memeliharanya. Satu dinar bagi orang ini akan lebih memperkuat dan lebih memperbanyak kegiatan daripada beberapa dinar di tangan orang lain.

Hal di atas, telah diisyaratkan Allah dalam firmanNya: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”. (QS. 34:39). “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui” (QS.

2: 268). Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahala-nya)” (QS. 30:39). “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. 2: 276).

Perbuatan Allah Swt dalam melipat gandakan dan menyuburkan harta tanpa kita ketahui sebab-sebabnya. Allah akan memberi dengan anugerahNya kepada setiap orang yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas AnugerahNya.

2. Tujuan Zakat Bagi *Mustahiq*

Dilihat dari sisi si penerimanya, zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman. Di antara dampak zakat yang dapat dilihat bagi si penerimanya ialah:

a. Zakat Membebaskan si Penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rezeki, baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, hati serta perasaannya aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.

Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam merealisasikan kehidupan bahagia. Hal ini sejalan dengan hadits, sebagaimana dikutip Yusuf al Qardhawi dari Kitab *al Targhib wa al Targhib* karangan al Hafizh al Munziri, yang menyebutkan:

أربع من السعادة: المرأة الصالحة, والمسكن الواسع, والجار الصالح, والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء, الجار السوء, والمرأة السوء, والمركب السوء, والمسكن الضيق. (رواه ابن حبان)

“Empat tanda kebahagiaan manusia: Istri yang shaleh, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang bagus. Dan ada empat pula tanda kecelakaan manusia: Tetangga yang buruk, isteri yang tidak baik, kendaraan yang buruk dan rumah yang sempit”.

Beberapa hal yang disebutkan Rasulullah dalam hadits di atas, merupakan pandangan kenabian yang mendasar dalam kehidupan rumah tangga, perhubungan, rumah dan tetangga yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia. Ini semua secara nyata telah dibuktikan kebenarannya di dalam kehidupan.

Sungguh, Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci manusia yang hidup sengsara dengan kefakirannya. Kebencian itu akan bertambah-tambah, jika kemiskinan itu berawal dari pembagian harta, saling menzalimi, serta saling menganiaya antara anggota masyarakat.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara aturan Islam dengan sistem materialis. Materialisme berhenti pada pemenuhan kebutuhan perut dan nafsu seksual, tidak melebihi dari kemanfaatan dunia saja. Kesenangan dan keleluasaan adalah merupakan tujuan akhirnya, surganya ada di atas dunia ini, sehingga mereka meranggapan tidak ada surga lain lagi.

Berbeda dengan itu, Islam telah menetapkan sasaran di belakang kekayaan dan kesenangan hidup, yaitu manusia bisa bertemu dengan Tuhannya. Manusia jangan hanya terpusat dan disibukkan untuk mencari sepotong roti, akan tetapi makrifat kepada Allah dan memperbaiki hubungan denganNya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat jauh lebih penting. Bila telah terpenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, manusia akan tenteram hidupnya, akan khusuk ibadahnya kepada Allah Swt yang telah memberi makanan di kala lapar dan mengamankan dari rasa takut.

Tidak ada dalil yang lebih tepat, yang mengatakan kebencian Islam terhadap kefakiran dan mencintai kekayaan serta kehidupan yang baik, dari pada Allah memberikan nikmat kepada RasulNya. Allah berfirman:

ووجدك عالة فأغنى¹⁵⁵

“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”.

Dalam firman Allah yang lain, disebutkan:

... ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب¹⁵⁶

“... Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki yang tiada disangka-sangka”.

Dari sini pula Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya salah satu tiang agama Islam. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan,

¹⁵⁵QS. Al Dhuha [93]: 8

¹⁵⁶QS. Al Thalak [65]: 2

minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan kesempurnaan hidup, serta kebutuhan pikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan ini pula, si fakir mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah. Dengan zakat ini, si fakir merasa bahwa ia adalah salah satu anggota yang hidup dari tubuh masyarakatnya, ia bukan benda yang disia-siakan dan dianggap aneh, akan tetapi ia adalah anggota masyarakat manusia yang mulia, yang ditolong dan dipeliharanya serta diberikan bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak disertai cercaan dan makian.

b. Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci.

Zakat bagi si penerima, juga akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Manusia, bila kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menyimpannya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkeraman kefakiran, pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya. Kebakhilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan kedengkian dan kehasadan kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan.

Islam telah menegakkan hubungan sesama manusia atas dasar persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan ini adalah kesamaan kemanusiaan dan kesamaan aqidah, sebagaimana Allah berfirman:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (سورة الحجرات: 10)¹⁵⁷

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat Rahmat”.

Persaudaraan tidak akan tegak, manakala seorang saudara kenyang dan yang lainnya lapar, akan tetapi dibiarkan, sama sekali tidak diberikan pertolongan. Bila demikian, maka hal ini berarti memutuskan unsur-unsur persaudaraan dan menyalakan api kebencian serta hasad dalam dada orang fakir. Kenyataan ini tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Islam tidak memerangi penyakit rohani (seperti hasad, iri hati, dengki dan sebagainya), dengan hanya memberikan nasehat semata-mata. Akan tetapi juga berusaha untuk mencabut sebab-sebabnya dari kehidupan dan mencabut akarnya dari masyarakat. Tidaklah cukup orang yang lapar atau orang yang telanjang tidak memiliki pakaian hanya diberi pelajaran secara mendalam tentang bahayanya dengki dan hasad, sementara ada kehidupan yang senang dan mewah di sekelilingnya. Islam melihat bagaimana seseorang bisa hasad?

Atas dasar itu maka Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para *fuqara* dan *masakin*, orang yang dililit utang dan sebagainya memenuhi seluruh hajat hidupnya. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa sebagian manusia adalah saudara bagi sebagian yang lain. Harta mereka juga “hartanya”. Setiap individu akan merasa bahwa kekuatan saudaranya adalah

¹⁵⁷QS. Hujurat [49]: 10

juga kekuatan baginya, manakala ia dalam keadaan lemah, kekayaan saudaranya adalah juga kekayaannya manakala ia dalam kesulitan.

3. Tujuan Zakat yang Berdampak Bagi Kehidupan Masyarakat

Sisi sosial dari sasaran zakat sudah jelas dan tidak diragukan lagi. Firman Allah dalam surah al Taubah ayat 60 menginformasikan bahwa sasaran zakat ada yang bersifat politis, karena ia berhubungan dengan Islam, dan ada yang sifatnya agama dan pemerintahan. Hal ini terlihat dari isyarat adanya bagian para *muallaf* yang dibujuk hatinya dan adanya bagian *sabilillah* (upaya menegakkan agama Allah). Di antara tujuan zakat bagi kehidupan bermasyarakat ialah:

a. Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Prilaku menolong, meskipun sifatnya pribadi, akan mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat saling berpengaruh, karena masyarakat itu sendiri merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Bila zakat pada awalnya hanya kewajiban kepada Allah akan berdampak membantu orang fakir, miskin, orang yang berutang dan lain sebagainya, akan mempunyai sasaran kemasyarakatan. Di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.

Zakat memiliki jaminan sosial dalam Islam, di mana aturan jaminan ini tidak dikenal Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spritual, seperti jaminan

akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan yang terakhir adalah “jaminan sosial”.

Banyak sekali orang yang pada suatu tahun mengeluarkan zakat, akan tetapi pada tahun berikutnya menjadi *mustahiq* zakat, karena berkurangnya harta yang ada di tangannya atau karena datangnya musibah yang menyebabkan mereka mempunyai utang, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, atau terputusnya mereka dari tanah air dan hartanya atau sebab-sebab lain. Dari segi ini, merupakan asuransi sosial. Dari segi lain ada orang-orang yang karena kefakiran dan kebutuhannya ia berhak menerima zakat. Dilihat dari segi ini, zakat dipandang sebagai jaminan sosial.

Dikatakan bahwa zakat itu lebih dekat kepada jaminan sosial dari pada asuransi sosial, karena zakat tidak diberikan kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, sebagaimana halnya pada asuransi sosial, akan tetapi memberinya berdasarkan pada kebutuhannya, sedikit atau banyak. Zakat dapat dipandang sebagai aturan pertama jaminan sosial yang tidak berpegang pada sedekah sunat individual, akan tetapi berpegang pada pertolongan penguasa secara teratur dan tersusun. Tujuan akhir dari pertolongan itu adalah, memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, baik makanan, pakaian, perumahan, maupun kebutuhan lainnya. Sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi atau cacat masyarakat, atau sebab-sebab lain yang datang, yang tidak bisa dihindari manusia.

b. Zakat dan Segi Ekonominya

Dilihat dari segi ekonomi, zakat merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Misalnya, pada zakat emas, perak atau mata uang, di mana Islam melarang menumpukkannya, menahannya dari peredaran dan pengembangan, dalam hal ini ada ancaman Allah:

... والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشربهم عذاب أليم (التوبة: 34)¹⁵⁸

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Tentulah tidak cukup sekedar ancaman yang berat ini, akan tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas dan simpanan. Hal itu tercermin ketika Islam mewajibkan zakat 2 ½ % dari kekayaan uang, apakah diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Dengan demikian, maka zakat itu merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring orang untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamalkan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu.

c. Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Zakat, dalam menegakkan nilai-nilai rohani, adalah seperti makan dan minum dalam timbangan jasmani. Dalam menegakkan nilai-nilai rohani umat,

¹⁵⁸QS. Al Taubah [9]: 34

Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surah al Taubah ayat 60, yaitu:

- 1) Menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat. Dalam hal ini ada nash yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia. Hal tersebut merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam al Qur'an surah al Taubah ayat 60, yaitu memerdekakan budak belian.
- 2) Membangkitkan semangat pribadi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikhawatirkan akan terjadi.

Sesungguhnya kemuliaan, kecintaan dan kebaikan dalam kehidupan ini, mampu memotivasi manusia untuk berbuat baik. Sebab semua itu akan mengangkat harkat dan nilai hidup manusia, dan ini pula yang dikehendaki Allah dalam menciptakan hidup dan kehidupan manusia. Jamaah mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan kemampuan-kemampuan tersebut pada setiap pribadi anggotanya agar ia produktif dan berkembang, bukannya ditinggalkan dengan begitu saja, dilemahkan keyakinannya dan dipadamkan sumbernya.

Dalam mencapai itu semua, kadangkala seseorang mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ia tidak memiliki apa-apa, agar dengan itu ia dapat

menolak keburukan kepada umatnya yang dikhawatirkan akan mengganggu ketenteramannya, serta memerangi hati sebagiannya yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Apabila orang yang berbuat demikian kita tinggalkan, maka orang tersebut akan dihadapkan kepada kefakiran, sebagai hasil dari amal perbuatannya itu, dan kalau demikian maka pasti ia tidak akan melakukannya lagi, dan tidak akan ada lagi orang yang mau berkorban hal yang sama.

Hal yang benar dan adil adalah orang mempunyai utang untuk kepentingan itu, harus ditanggung oleh harta jamaah, atau hendaknya ada bagian harta untuk merangsang kebaikan ini serta menumbuhkan keberanian dalam melakukan kebaikan, sehingga jangan sampai seseorang dihadapkan kepada kefakiran hanya karena perbuatannya yang baik kepada umat. Inilah sesungguhnya yang dimaksud Islam dan dipastikan Allah pada ayat sedekah dengan *gharimin* atau orang yang berutang.

- 3) Memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya yang bersifat ajali. Ini dinyatakan Allah dalam firmanNya; *fi sabilillah* (dan dalam jalan Allah). Di antara makna yang dimaksud ke dalam ayat *fi sabilillah*, adalah biaya untuk perang dan pertahanan, yakni mempersiapkan pasukan. Pertahanan dan jihad dalam Islam, sesungguhnya adalah untuk mempertahankan akidah

dan membela agamaNya, bukan semata masalah ekonomi atau materi, bukan pula jihad untuk membela tanah air sambil memutuskan hubungan dengan Allah, tetapi jihad itu, bahkan sebelum segala sesuatu, adalah jihad dalam membela agama Allah saja, terutama dalam memelihara, menegakkan dan memantapkan akidah serta memperpanjang kekuasaanNya. Dengan memelihara pokok-pokok yang tiga ini, zakat berfungsi untuk menetapkan nilai yang tinggi dan nilai maknawi yang asasi, yang harus dipelihara oleh masyarakat Islam. Dengan ini pula akan terealisasi kesempurnaan dan saling tanggung menanggung dalam kehidupan Islam dan pada semua aturan Islam.

Zakat, walaupun secara lahiriah merupakan aturan materi saja, tidak bisa dilepaskan dari akidah, tidak bisa dilepaskan dari ibadah, tidak bisa dilepaskan dari nilai akhlak, tidak bisa dilepaskan dari politik dan jihad, tidak bisa dilepaskan dari problematika pribadi dan masyarakat serta tidak bisa dilepaskan dari seluruh segi kehidupan¹⁵⁹.

Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan bagi Muslim yang merdeka, baligh dan berakal¹⁶⁰.

Adapun sifat-sifat dan syarat-syarat harta yang wajib dizakati ialah:

1. Milik Penuh

Maksud milik penuh ialah harta itu berada di bawah penguasaan, pengawasan atau kekuasaan seseorang, dan bukan dari harta yang tidak halal. Dalil penetapan kepemilikan tersebut adalah surah al Taubah ayat 103 Dalam ayat

¹⁵⁹Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 847-885

¹⁶⁰Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), Jilid 1, h. 123-124

ini terdapat kata *اموالهم* “*amwal*” yang di-*idhafah*-kan kepada *hum*¹⁶¹. Dalam kaedah bahasa Arab, berarti kepemilikan penuh dari kekayaan yang mereka miliki, yang hanya bisa terjadi dengan adanya penguasaan dan hanya dia sendiri yang dapat mengambil kebijaksanaan terhadap harta itu. Arti kepemilikan di sini bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta, karena yang memiliki seluruh harta adalah Allah. Kepemilikan di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang kepada manusia. Oleh karena itu pengertian kepemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa manusia itu berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari harta itu.

Istilah “milik penuh” di atas, maksudnya adalah kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau dalam kata lain harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dia digunakan serta faedahnya dapat dinikmatinya¹⁶².

Bagaimana halnya zakat harta pinjaman? Apakah peminjam merupakan pemilik penuh atau zakatnya dibebankan kepada orang yang meminjamkan. Menurut Yusuf al Qardhawi, zakat harta yang dipinjam dibebankan kepada si piutang (yang memberi pinjaman), bila pinjaman tersebut masih dapat diharapkan kembali, sebaliknya bagi pinjaman yang tidak dapat diharapkan kembali, tidak wajib zakat¹⁶³.

2. Berkembang

¹⁶¹Lihat QS. Al Taubah [9]: 103

¹⁶²Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 127-128

¹⁶³*Ibid.*, h. 141, Sungguhpun demikian para fuqaha sesungguhnya berbeda pendapat dalam menyikapi zakat harta yang dipinjam ini, lihat Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala al Madzahibi al Arba'ah*, (Kairo: Mathba'ah al Istiqamah, t.th), Jilid 4, h. 124-127

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang mempunyai potensi untuk berkembang. Istilah berkembang ini dapat diartikan dengan; keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi dan sejenisnya.

Menurut para fuqaha istilah berkembang berarti “bertambah”. Bertambah yang dimaksud dapat dalam dua bentuk, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit berarti bertambahnya harta sebagai akibat pembiakan atau perdagangan atau sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara konkrit maksudnya, kekayaan itu berpotensi untuk berkembang baik harta itu berada di tangannya ataupun di tangan orang lain¹⁶⁴.

Dijadikannya “berkembang” sebagai syarat pada harta yang akan dizakatkan adalah agar *muzakki* tidak jatuh bangkrut dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah saw; “tidak akan berkurang kekayaan karena zakat”. Karena zakat itu hanyalah sejumlah yang sangat kecil dari sesuatu kekayaan yang sangat banyak, berkembang, dan diinvestasi, yang berdasarkan *sunnatullah* tidak akan mengurangnya. Sebaliknya harta yang tidak berkembang tidak diwajibkan zakat oleh Rasulullah, seperti kuda tunggangan dan budak¹⁶⁵. Sebagaimana sabda beliau:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلعم : ليس على المسلم في عبده ولا
فراسه صدقة¹⁶⁶

¹⁶⁴Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 138

¹⁶⁵Di zaman Rasulullah kuda dan hamba sahaya bukan merupakan harta yang berkembang, Lihat Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Bari...*, *Op. cit.*, h. 383

¹⁶⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz. Ke-2, hadits no. 8 dan 9, h. 676, Hadits ini juga diriwayatkan Imam Bukhari, dalam bab “Wajib Zakat”.

“Dari Abu Hurairah, ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw : “Tidak dipungut zakat seorang muslim atas seorang hamba dan atas kuda tunggangannya”.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa di antara harta yang tidak dapat dikembangkan adalah harta yang dipiutangkan dan tidak mungkin diharapkan kembali, terkubur yang tidak diketahui tempatnya atau karena hal lain, yang pada intinya harta itu diluar kekuasaan pemiliknya, maka tidaklah wajib zakat. Tetapi bila kesalahan berada pada pihak pemilik, maka agama tidak memandang orang itu dapat dimaafkan karena tidak mengembangkan kekayaannya tersebut. Dengan demikian ia harus mengeluarkan zakatnya tanpa melihat apapun penyebab ia tidak mampu mengembangkan kekayaannya tersebut. Artinya perasaan tidak mampu menurut Islam tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskan seorang pemilik kekayaan dari kewajiban-kewajibannya¹⁶⁷. Misalnya orang yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab*, tetapi harta itu hanya disimpan di rumah, maka harta itu tetap dizakatkan. Sampai jumlahnya kurang dari *senishab*.

3. Cukup Se-*nishab*

Untuk wajibnya zakat disyaratkan hendaknya harta yang dimiliki itu mencapai *nishab*. *Nishab* secara syarak berarti “sesuatu (ukuran) yang ditetapkan oleh *Syari'* sebagai tanda wajibnya zakat”¹⁶⁸. Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai *senishab* disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus

¹⁶⁷Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 143-144

¹⁶⁸Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala...*, *Op. cit.*, h. 102

dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%¹⁶⁹. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan sedekah sebanyak satu ikat¹⁷⁰. Tetapi *jumhur* ulama berpendapat bahwa *nishab*lah merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan.

Hikmah adanya ketentuan *nishab* adalah karena zakat merupakan “pajak” yang dikenakan atas orang kaya. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan zakat, sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw, di antaranya:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلعم : خير الصدقة ما كان ظهر غني... (رواه البخارى)¹⁷¹

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw bersabda: “Zakat yang paling baik itu adalah yang dikeluarkan oleh orang kaya”.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara ulama fiqh ada yang mensyaratkan bahwa harta yang akan dizakatkan itu harus lebih dari kebutuhan biasa (rutin). Ulama-ulama Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Yusuf al Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al Zakat*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin adalah, sesuatu yang betul-betul untuk kebutuhan hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman, senjata-senjata untuk mempertahankan diri, atau pakaian yang diperlukan untuk

¹⁶⁹*Ibid.*, h. 149

¹⁷⁰Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 150

¹⁷¹Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al ...*, *Op. cit.*, h. 346

melindungi tubuh dari panas dan dingin. Juga termasuk kebutuhan primer adalah membayar utang (yang dibuat karena memenuhi kebutuhan primer), peralatan kerja, perabot rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan. Artinya, bila seseorang mempunyai uang *senishab* tetapi digunakan untuk belanja kebutuhan yang disebutkan di atas, maka tidak termasuk golongan orang kaya yang harus membayar zakat¹⁷².

Argumentasi menjadikan “lebih dari kebutuhan rutin (primer)” sebagai salah satu syarat harta wajib dizakatkan adalah firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 219:

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ... (البقرة: 219)

...“Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

“yang lebih dari kebutuhan¹⁷³”...

Makna sesuatu “yang lebih dari kebutuhan” menurut Ibnu Abbas, sebagai mana yang disebutkan Yusuf al Qardhawi adalah, sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga¹⁷⁴. Hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Allah Swt menetapkan objek zakat adalah sesuatu yang lebih dari keperluan: Keperluan orang itu, keluarga, dan orang yang di bawah tanggungannya. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah:

إِذَا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا، فَإِنَّ فَضْلَ شَيْءٍ فَلْأَهْلِكَ، فَإِنَّ فَضْلَ شَيْءٍ عَنْ أَهْلِكَ فَتَذَوِّي قَرَابَتِكَ، فَإِنَّ فَضْلَ عَنْ ذَوِّي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا¹⁷⁵.

¹⁷²Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 152

¹⁷³QS. Al Baqarah [2]: 219

¹⁷⁴Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 154

¹⁷⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi*, (Kairo: Dar al Hadits, 1994), Cet. Ke-1, Jilid. IV, h. 90

“Dahulukan kepentingan dirimu, jika lebih berikanlah untuk keluargamu, jika masih lebih berikan kepada kerabatmu yang dekat, bila lebih berikanlah untuk yang lain”.

Keumuman hadits di atas, memberikan petunjuk bahwa etika Islam dalam berkorban serta sasarannya, sebagaimana ditegaskan oleh ayat-ayat al Qur'an adalah “sesuatu yang lebih”, dan “sesuatu yang lebih”, itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan, demikian pendapat jumhur ulama.

5. Bebas dari Utang

Para *fuqaha* yang berpendapat bahwa di dalam harta zakat ada hak fakir miskin, mengatakan zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki utang, karena hak orang yang memberi utang lebih utama dari pada hak fakir miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah “milik” orang yang memperutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut. Akan tetapi, *fuqaha* yang berpendapat bahwa zakat adalah ibadah, seperti shalat dan puasa, orang yang mempunyai utang tetap diwajibkan zakat, karena ibadah itu wajib atas setiap *mukallaf*, tidak ada hubungannya dengan utang, dan zakat adalah kewajiban manusia kepada Allah, sedangkan menutup utang adalah kewajiban kepada manusia, bertemu dua kepentingan, maka hak Allah harus didahulukan¹⁷⁶.

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa yang lebih dekat dengan tujuan syariat adalah gugurnya zakat bagi orang yang mempunyai utang, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

¹⁷⁶Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 552-553

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلعم : فيما صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (رواه البخارى)¹⁷⁷

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw bersabda: “Di dalam harta benda ada zakatnya yang dipungut dari si kaya dan dibagikan kepada si fakir/miskin”.

Bila seseorang membayar utangnya yang mengakibatkan kekayaannya tidak lagi sampai *senishab*, berarti ia bukanlah orang kaya. Penting untuk diketahui bahwa utang yang menggugurkan kewajiban zakat adalah utang yang sudah jatuh tempo yang harus dibayar, sedangkan terhadap utang yang belum harus dibayar, atau ada jalan lain yang akan melunasi utang tersebut, tidaklah menggugurkan kewajiban zakat¹⁷⁸.

6. Berlalu Setahun

Syarat lain atas harta yang wajib dizakatkan ialah apabila harta itu berada pada pemiliknya selama dua belas bulan *qomariyah* (bulan *qomariyah* adalah sistem kalender dalam Islam). Ini hanya berlaku khusus terhadap ternak, uang, dan harta benda dagang, atau dikenal dengan istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dikenal dengan istilah “zakat pendapatan”¹⁷⁹.

¹⁷⁷Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al ...*, *Op. cit.*, h. 346

¹⁷⁸Misalnya seorang Pengusaha mempunyai utang Rp.100.000.000,- setiap bulannya ia harus membayar Rp.10.000.000,- penghasilan yang diperolehnya setiap bulan sebesar Rp.25.000.000,- dengan demikian ia masih mempunyai sisa uang Rp.15.000.000,-, sisa uang lima belas juta tersebut harus dikeluarkan zakatnya, kendatipun ia masih mempunyai sisa utang, akan tetapi sisa utangnya tersebut belum lah jatuh tempo pembayarannya, yang menggugurkan kewajiban zakatnya.

¹⁷⁹Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 161

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa *jumhur* ulama fiqh mensyaratkan *haul* (waktu satu tahun) pada emas, perak, dan hewan ternak, sebab para khalifah yang empat telah menetapkan demikian, dan hal tersebut telah diyakini mereka sebagai suatu yang *tauqif* (penetapan dari syarak)¹⁸⁰.

Ulama sepakat bahwa zakat kekayaan nominal, yaitu dari ternak, uang, dan harta benda dagang hanya diwajibkan satu kali dalam satu tahun dan bahwa zakat suatu kekayaan tidak dipungut dua kali dalam tahun itu¹⁸¹.

Ditetapkannya zakat dalam waktu satu tahun bulan *qomariyah*, karena ini dirasakan sangatlah adil, sebab bila zakat ditetapkan satu kali sebulan atau sekali seminggu, akan menyakiti pemilik kekayaan, tetapi bila ditetapkan sekali seumur hidup akan menyakiti orang-orang miskin. Karena itu yang paling adil adalah mewajibkannya sekali dalam setahun.

Harta yang Wajib Zakat

Al Qur'an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan yang wajib dizakati serta syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan Allah Swt kepada Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah al Nahl [16]: 44 yang menyebutkan; "Kami turunkan kepadamu al Qur'an supaya kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".

Beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah ialah:

¹⁸⁰Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 602

¹⁸¹Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, h. 163

1. Emas dan perak, dalam firmanNya: "... orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS. Al Taubah [9]: 34)
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan Allah: "... makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)...". (QS. Al An'am [6]: 141)
3. Hasil usaha, misalnya perdagangan dan lainnya, firman Allah Swt: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...". (QS. AL Baqarah [2]: 267)
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah Swt berfirman: "...dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...". (QS. Al Baqarah [2]: 267)¹⁸².

Selain yang disebutkan di atas, al Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan" seperti firman-Nya: "Ambillah zakat dari sebagian harta (kekayaan) mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. AL Taubah [9]: 103). Dalam firman-Nya yang lain Allah juga menegaskan bahwa: "Dan pada harta-harta (kekayaan) mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan" (QS. Adz Dzariyat [51] : 19)

¹⁸²*Ibid.*, h. 122-123

“Kekayaan” (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal* yang diartikan dengan harta benda¹⁸³. Mustafa Ahmad Zarqa’ dalam bukunya *al Fiqh al Islami fi Tsaubih al Jadid*, sebagaimana yang dikutip oleh M. Zaidi Abdad mendefenisikan harta dengan:

كل عين ذات قيمة مادية متداولة بين الناس

“Semua wujud materi yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia”¹⁸⁴.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa seluruh harta benda atau materi yang mempunyai nilai dan dimiliki manusia, merupakan kekayaan yang terkategori dalam wajib dizakatkan sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam berbagai firmanNya.

1. Emas dan Perak

Transaksi pada zaman Nabi Muhammad saw, di kalangan orang Arab melakukan jual beli, menggunakan mata uang emas, dalam bentuk dinar dan ada pula perak dalam bentuk dirham. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewajiban zakat terhadap emas, tidak hanya dalam bentuk emas batangan atau dalam bentuk lainnya, akan tetapi uang yang termuat dari emas, juga wajib dizakatkan. Penetapan kewajiban zakat uang ini bersumber kepada firman Allah Swt, sunnah Rasulullah saw, dan *ijma’* ulama. Firman Allah Swt tentang kewajiban zakat uang ini, terdapat dalam surah al Taubah ayat 34-35:

... والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشربهم بعذاب أليم (34). يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مكنزكم لأنفسكم فنفقوا ما كنتم تكنزون (35).

¹⁸³A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), Cet. Ke-25, h. 1368

¹⁸⁴M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), Cet. Ke-1, h. 47

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, serta tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”¹⁸⁵.

Dua ayat di atas, memperingatkan bahwa dalam emas dan perak terdapat hak Allah secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari redaksi yang menyebutkan: “dan mereka tidak menafkahkan”. Bahasa ini cenderung kepada pengertian emas dan perak dalam bentuk uang, karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai untuk itu. Ayat di atas menunjukkan ancaman Allah dalam dua hal; pertama penyimpanannya, dan kedua, tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini berarti dianggap “tidak berzakat”, bila tidak berinfaq pada jalan Allah Swt¹⁸⁶.

Dalam hadits Rasul disebutkan, sebagaimana yang disampaikan Abu Bakar dalam suratnya kepada Anas, yakni:

عن أنس أن ابابكر الصديق رضى الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلعم على المسلمين: ... وفى الرقاة فى مائتى درهم ربع العشر, فان لم تكن الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها (رواه البخارى)¹⁸⁷.

“Dari Anas ra., ia berkata: Bahwasanya Abu Bakar al Shiddiq pernah mengirim surat kepadanya yang isinya sebagai berikut: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah mewajibkan kepada semua orang Islam untuk menunaikan sedekah fardhu: ...“Adapun zakat perak, maka dalam setiap 200 dirham, dua setengah persen (2,5%). Jika hanya 190 dirham saja, maka tidak perlu dizakati, kecuali bila pemiliknya berkehendak sebagai suatu sedekah saja”.

¹⁸⁵QS. Al Taubah [9]: 34-35

¹⁸⁶Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 244-245

¹⁸⁷Al Hafizh ibn Hajar al ‘Asqalani, *Op. cit.*, h. 282

Menyikapi firman Allah dan sabda Rasul di atas, mayoritas fuqaha menetapkan zakat emas, juga wajib dalam bentuk mata uangnya. Bahkan uang yang tidak terbuat dari emas pun juga wajib dizakatkan¹⁸⁸.

Untuk melihat lebih jelas *nishab* emas dan perak ini, serta berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan, berikut akan penulis gambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel. IV. 1

Nishab Emas dan Perak¹⁸⁹

No	Bentuk Emas	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishab</i>	Kadar	Waktu	
1.	Emas murni	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5 %	Tiap tahun	- Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i> -nya senilai 107,76 gram. - Menurut Yusuf al Qardhawi <i>Nishab</i> -nya senilai 85 gram
2.	Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	- Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i> -nya senilai 107,76 gram. - Menurut Yusuf al Qardhawi <i>Nishab</i> -nya senilai 85 gram - Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat
3.	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap tahun	- Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i> -nya senilai 700 gram
4.	Perhiasan perabot/perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap tahun	- Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i> -nya senilai 700 gram

2. Tanaman dan Buah-buahan

¹⁸⁸Abdurrahman Al Jaziri, *Op. cit.*, h. 106

¹⁸⁹Sumber: Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, h. 58

Kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian baik dalam bentuk tanaman ataupun buah-buahan ditetapkan oleh firman Allah Swt dan sabda Rasulullah saw serta *ijma'* para ulama. Di antaranya surah al An'am (6) ayat 141:

وهو الذى أنشأجنت معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ولا تشرفوا إنه لا يحب المسرفين¹⁹⁰

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Selanjutnya di antara sekian banyak hadits Rasulullah saw yang menjadi dasar kewajiban zakat pertanian, ialah:

عن ابى هريرة قال رسول الله صعلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر (رواه النسائي)¹⁹¹

“Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: “(Tanaman) yang diairi oleh hujan, mata air atau air tanah, zakatnya 10 %, sedangkan yang diairi, zakatnya 5 %”.

Berpijak kepada firman Allah dan hadits Rasulullah di atas, maka para ulama sepakat (*ijma'*), bahwa hukum mengeluarkan zakat pertanian adalah wajib, kendatipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang akan dizakatkan. Menurut Abu Hanifah, seluruh jenis hasil tanaman yang ditanam, wajib zakat 10 % atau 5 % kecuali kayu api, dan bambu, karena tidak biasa

¹⁹⁰Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 212

¹⁹¹Imam Nasa-i, *Sunan al Nasa-i bi Syarh Jalaluddin al Suyuthi*, (Beirut: Dar al Ma'arif, 1991), Juz VI, h. 290

ditanam orang. Namun demikian, bila sengaja membudidayakannya maka wajib dikeluarkan zakatnya, hal itu sesuai dengan keumuman ayat¹⁹². Menurut Yusuf al Qardhawi, pendapat Abu Hanifah tersebut adalah yang paling kuat untuk dipegang¹⁹³.

Guna melihat lebih jelas, kuantitas zakat pertanian serta besaran zakat yang akan dikeluarkan, dapat diamati tabel di bawah ini.

Tabel. IV. 2

Nishab Tanaman dan Buah-buahan¹⁹⁴

No	Bentuk Pertanian	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishab</i>	Kadar	Waktu	
1.	Padi	1.481 Kg gabah/815 Kg beras	5% s/d /10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras
2.	Biji-bijian: Seperti; jagung, kacang-kacangan, dsb	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. - Syafi'i sependapat dengan Hambali, namun beliau menambahkan harus makanan pokok.
3.	Tanaman hias: Seperti; anggrek, dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). - Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
4.	Rumput-rumputan: Rumput hias, tebu, bambu dsb.	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). - Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
5.	Buah-buahan: Kurma, mangga,	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d	Tiap panen	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati

¹⁹²Abdurrahman al Jaziri, *Op. cit.*, h. 149

¹⁹³Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...., Op. cit.*, h. 337

¹⁹⁴Sumber: Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, h. 57-58

	jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.		10%		apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). - Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
6.	Sayur-sayuran: Bawang, wartel, cebe, dsb.	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	- Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). - Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
7.	Segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran <i>nishab</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	- Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). - Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib zakat itu hanya terbatas pada tanaman dan buah-buahan yang dijadikan makanan pokok. Bila tidak, tidak ada kewajiban zakat. Petani akan dikenai kewajiban zakat apabila ia menanam tanaman atau buah-buahannya untuk keperluan bisnis, yakni sebesar 2,5 %.

Menurut mazhab Hambali, tanaman dan buah-buahan baru wajib zakat bila hasil pertanian itu tahan disimpan dalam waktu yang lama. Akan tetapi Hambali tidak merinci berapa lama waktu yang dimaksud.

Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah yang berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%, kecuali kayu api dan bambu yang hidupnya tidak ditanam. Akan tetapi, bila seseorang sengaja menanamnya, maka benda itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat Imam Hanafi ini beralasan kepada prinsip umum firman Allah surah al Baraqah [2] ayat 267 yang menyebutkan: "... dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...", serta firman Allah dalam surah al An'am [6] ayat 141: "...bayarlah haknya waktu memanennya...". Imam Abu Hanifah juga melegitimasi pendapatnya dengan sabda Rasul yang menyebutkan: "Tanaman yang diairi air hujan zakatnya 10% sedangkan yang diairi (dengan menggunakan biaya) zakatnya 5%". Di sana Allah dan Rasul tidak memberikan pengecualian, apakah dikonsumsi sebagai makanan pokok atau tidak, apakah tahan atau tidak tahan disimpan.

Sedangkan Imam Syafi'i men-*takhshish*-nya dengan hadits Rasul yang berasal dari Mu'az bin Jabal, di antaranya berbunyi; "Sedangkan mentimun, semangka, delima, tebu dan sayur dikecualikan oleh Rasulullah saw".

Kenyataan di atas, dapat dimaklumi karena Imam Hanafi berpendapat bahwa *dalalah* lafaz '*am*' tersebut adalah *qath'i*. Sehingga ia tidak dapat di-*takhshish* oleh hadits *ahad*. Sebaliknya Syafi'i berpandangan *dalalah* lafaz '*am*' adalah *zhanni*, sehingga ia dapat di-*takhshish*.

3. Zakat Barang Dagangan

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah Swt.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, nilainya sudah mencapai *nishab* pada akhir tahun itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dihitung dari modal dan keuntungannya. Dasar hukum wajibnya zakat perdagangan ini ialah firman Allah Swt dalam surah al Baqarah [2] ayat 267, yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”¹⁹⁵.

Selanjutnya dalam sebuah hadits Rasulullah saw juga pernah bersabda:

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : كان رسول الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذى نعدده للبيع (رواه ابو داود)¹⁹⁶

“Dari Samurah putera Jundub, ra., ia berkata: “Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual”. (HR. Abu Daud).

Yusuf al Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al Zakat* menyebutkan bahwa, Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Umar, “Budak maupun pakaian yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan wajib atasnya zakat”¹⁹⁷.

Imam Syafi’i meriwayatkan, dari Zuraik bin Hakim, ia menceritakan bahwa Umar bin Abdul ‘Aziz mengirim surat kepadanya yang berisi pernyataan: “Lihatlah orang-orang muslim yang kaya yang berada dalam kekuasaanmu,

¹⁹⁵QS. Al Baqarah [2]: 267

¹⁹⁶Al Hafizh Ibn Hajar al ‘Asqalani, *Bulughu...., Op. cit.*, h. 293

¹⁹⁷Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...., Op. cit.*, h. 304

ambillah (zakat) dari harta perniagaan mereka; yaitu setiap 40 dinar zakatnya adalah 1 dinar (1/40 atau 2,5%)”¹⁹⁸.

Barang dagangan yang dimaksud di sini ialah barang perdagangan selain emas dan perak. Tiga imam mazhab kecuali Maliki sepakat bahwa emas dan perak tidak termasuk dalam barang dagangan. Seluruh barang dagangan seperti kain, besi, dan lain sebagainya wajib dizakati sebesar 2,5%¹⁹⁹, dengan kuantitas *nishab* sama dengan emas atau perak.

Menurut Imam Hanafi suatu perdagangan akan dikenakan wajib zakat, apabila:

- a. Harga barang dagangan itu mencapai *nishab* emas/perak.
- b. Telah berlangsung selama setahun. Bila seseorang diawal tahun dagangannya cukup se-*nishab*, kemudian pertengahan tahun kurang, akan tetapi di akhir tahun cukup lagi se-*nishab*, maka diwajibkan zakat. Artinya, wajib zakat atau tidaknya terhadap harta perdagangannya ditentukan oleh jumlah hartanya di akhir tahun.
- c. Barang-barang yang dibeli tersebut diniatkan untuk diperjual-belikan. Dengan kata lain ada niat untuk berdagang²⁰⁰.

Yusuf al Qardhawi menambahkan pedagang tersebut bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok²⁰¹.

¹⁹⁸Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab al Umm fi al Fiqh*, Terj. Mohammad Yasir Abd. Muthalib, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. Ke-1, h. 462

¹⁹⁹Abdurrahman al Jaziri, *Op. cit.*, h. 130

²⁰⁰Secara umum para imam mazhab yang lain juga menetapkan syarat yang sama, yakni ada niat ingin berdagang, telah setahun berlalu, jumlah *nishab* dihitung pada akhir tahun. Lihat Abdurrahman al Jaziri, *Op. cit.*, h. 130-131

²⁰¹Yusuf al Qardhawi, *Fiqh....*, h. 314

Masih menurut Yusuf al Qardhawi, beliau menyampaikan pendapat Maimun bin Mihran: “Apabila seseorang pedagang sudah berdagang selama 1 tahun, tibalah waktunya untuk berzakat, maka hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang dagangan yang tersisa, hitung berapa nilai barang itu, begitu pula piutang yang masih mungkin akan kembali, kemudian keluarkan utangmu sendiri, dari sisa harta yang ada barulah dikeluarkan zakatnya²⁰².”

Gambaran jelas tentang *nishab* perdagangan serta jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya, dapat diperhatikan isian tabel di bawah ini.

Tabel. IV. 3

Nishab Harta Perdagangan

No	Bentuk Perdagangan	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishab</i>	Kadar	Waktu	
1.	Perdagangan, export/import, kontraktor, real estate, percetakan, penerbitan, swalayan, super market, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i>nya 107,76 gram emas murni. - Menurut Yusuf al Qardhawi <i>nishab</i>nya 85 gram

4. Zakat Barang-barang Tambang dari Perut Bumi dan Hasil Laut

Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari perut bumi seperti emas, perak, besi, timah, belerang, minyak bumi, gas dan lain-lain, yang bermanfaat bagi manusia²⁰³. Yusuf al Qardhawi membedakan antara barang tambang (*ma'din*) dengan *kanz*. *Ma'din* (barang tambang) ialah; sesuatu pemberian bumi yang berbentuk dari benda lain tetapi berharga. Maksud “sesuatu pemberian bumi”, bukan sesuatu yang di dapat dari laut, dan bukan pula simpanan

²⁰²*Ibid.*, h. 318

²⁰³*Ibid.*, h. 414

manusia. “Terbentuk dari benda lain”, berarti bukan tanah atau lumpur, karena keduanya adalah bagian dari bumi, dan “berharga” berarti sesuatu harta benda yang mempunyai nilai di kalangan manusia. Misalnya emas, perak, belerang atau lainnya, yang bukan berasal dari sesuatu kepunyaan manusia. Sedangkan *kanz* adalah tempat tertimbunnya harta karena perbuatan manusia²⁰⁴.

Perbedaannya adalah, *ma’din* (barang tambang) harta yang belum bertuan, atau bukan simpanan manusia yang tertimbun dalam tanah. Sedangkan *kanz* adalah simpanan manusia yang tertimbun dalam tanah. Adapun *rikaz* mencakup keduanya, yaitu *ma’din* dan *kanz*. Artinya *rikaz* dapat berbentuk barang yang belum bertuan ataupun kepunyaan manusia yang tertimbun dalam tanah.

Dasar hukum wajib zakat atas barang tambang, di antaranya disebutkan Allah dalam surah al Baqarah (2) ayat 267, yaitu:

... ومما أخرجناكم من الأرض... (البقرة: 267)

“... dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”²⁰⁵.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda:

عن بلال بن الحارث رضى الله عنه: أن رسول الله صعلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة
(رواه ابوداود)²⁰⁶

“Dari Bilal putera Harits, ra., ia berkata: “Bahwasanya Rasulullah saw mengambil zakat barang tambang kaum Qabalah”.

Dalam hadits lain Rasulullah saw bersabda:

²⁰⁴*Ibid.*, h. 408

²⁰⁵QS. Al Baqarah [2]: 267

²⁰⁶Al Nasa-i, *Op. cit.*, h. 46, Baca juga AL Hafizh ibn Hajar al ‘Asqalani, *Op. cit.*, h. 292

عن عمرو بن شعيب قال أن رسول الله صعلم سئل عن اللقطة, ماكان في طريق ماتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فلك, ومالم يكن في طريق ماتي ولا في قرية عامرة فقية الركاز الخمس (رواه ابوداود)²⁰⁷

“Dari Amr ibn Syu’ib bahwa sesungguhnya Rasulullah saw ditanya oleh seseorang tentang barang temuan, ia bertanya: Sesuatu yang ditemukan di jalan umum atau di daerah pemukiman, maka umumkanlah selama satu tahun, jika pemiliknya datang, berikanlah, dan jika tidak maka itu adalah milikmu. Dan sesuatu yang tidak ditemukan di jalan umum atau di daerah pemukiman, maka harta itu adalah *rikaz* dan wajib dikeluarkan 1/5.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang termasuk ke dalam barang tambang adalah segala sesuatu yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Adapun barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api, tidak termasuk barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya²⁰⁸.

Imam Syafi’i menyebutkan bahwa barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak, sedangkan terhadap barang tambang seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara dan lainnya tidak ada kewajiban zakat atasnya. Zakat yang wajib dikeluarkan atas barang tambang emas dan perak adalah 2,5% sama seperti zakat emas dan perak, tanpa syarat setahun. Karena untuk barang tambang tidak ada syarat harus sampai setahun²⁰⁹.

Golongan Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari dalam tanah dan bukan dari jenis tanah itu sendiri. Baik benda itu padat, seperti emas atau perak ataupun cair,

²⁰⁷Al Nasa-i, *Loc. Cit*

²⁰⁸Lihat Abdurrahan al Jaziri, *Op. cit.*, h. 141-142

²⁰⁹Abdurrahman al Jaziri, *Op. cit.*, h. 146-147

seperti minyak dan sebagainya. Barang siapa menemukannya dari dalam tanah dan memilikinya wajib menzakati 10% dengan dua syarat:

- a. Mencapai *nishab*,
- b. Yang mengeluarkan barang tersebut adalah orang yang dikenai kewajiban zakat. Maka, bila orang kafir atau orang yang mempunyai utang dan lain sebagainya tidak wajib zakat.

Bila barang tambang itu dikeluarkan dari tanah milik orang, maka ia menjadi milik sipunya tanah. Akan tetapi bila ditemukan dari tanah yang belum bertuan, maka menjadi milik orang yang menemukannya, dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%²¹⁰.

Untuk mengetahui zakat barang tambang dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dapat dilihat daftar tabel di bawah ini.

Tabel. IV. 4

Nishab Harta Barang Tambang

No	Bentuk Barang Tambang	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishab</i>	Kadar	Waktu	
1.	Emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Ketika memperolehnya	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Hanafi, <i>nishabnya</i> senilai 107,76 gram. - Menurut Yusuf al Qardhawi <i>nishabnya</i> senilai 85 gram - Menurut mazhab Hanbali, kadar zakatnya 2,5% - Menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%.
2.	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Ketika memperolehnya	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Hanafi <i>nishabnya</i> 700 gram dan kadar zakatnya 20%
3.	Tambang selain emas dan perak (misalnya; platina,	Se- <i>nishab</i> dg emas	2,5%	Ketika memperolehnya	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib zakat apabila diperdagangkan

²¹⁰*Ibid.*, h. 145

	besi, tembaga, batu bara, marmer, minyak, harta karun dan sebagainya)			lehnya	(dikategorikan zakat perdagangan) - Menurut mazhab Hanafi barang tambang selain logam (yang ditempa dan dibakar) tidak wajib zakat - Menurut mazhab Hambali wajib zakat dengan kadar zakat 10%
--	---	--	--	--------	--

5. Zakat Hewan Ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak dan jenisnya, akan tetapi hanya mewajibkan terhadap ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Sampai *nishab*. Syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai *nishab*, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syarak. Orang yang hanya memiliki seekor atau dua ekor unta tidak diwajibkan zakat. Misalnya syarat zakat unta menurut *ijma'* ulama adalah 5 ekor, orang yang memiliki unta di bawah jumlah tersebut tidak diwajibkan zakat.
- b. Telah dimiliki selama setahun. Syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.
- c. Digembalakan. Disebutkannya “pengembalaan” di dalam syarat binatang ternak yang wajib zakat, karena pada umumnya *nishab-nishab* itu tidak terdapat pada ternak yang diberi makan.
- d. Tidak dipekerjakan. Maksudnya hewan ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti menggarap tanah pertanian, mengangkut

barang-barang dan lain sebagainya. Seperti yang sering terjadi kepada unta atau sapi²¹¹.

Hewan ternak yang dikenai zakat, tersebut di antaranya ialah:

1) Zakat Unta

Hewan ternak jenis unta, setiap 5 ekor wajib dizakatkan satu ekor kambing. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw:

عن عبيد الله عن أنس بن مالك ... في خمس ذو شاة (رواه النسائي)²¹²

“Dari Ubaidillah dari Anas ibn Malik... pada setiap lima ekor unta wajib dikeluarkan satu ekor kambing”.

Kemudian bila jumlahnya telah mencapai 25 ekor, maka wajib dizakatkan satu ekor anak unta betina (berumur satu tahun lebih). Selanjutnya setiap bertambah 10 ekor, umur unta yang akan dizakatkan ditambah setahun setiap bertambahnya 10 ekor unta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel. IV. 5

*Nishab Zakat Unta*²¹³

No	<i>Nishab</i> Unta	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
	Dari Sampai Dengan	
1.	5 s/d 9	1 ekor kambing
2.	10 s/d 14	2 ekor kambing
3.	15 s/d 19	3 ekor kambing
4.	20 s/d 24	4 ekor kambing
5.	25 s/d 35	1 ekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)
6.	36 s/d 45	1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

²¹¹Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 170-172

²¹²Imam Nasa-i, *Sunan al Nasa-i bi Syarh Jalaluddin al Suyuti*, (Beirut: Dar al Ma’arif, 1991), Juz. V, h. 28

²¹³Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...*, *Op. cit.*, h. 176

7.	46 s/d 60	1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
8.	61 s/d 75	1 ekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih)
9.	76 s/d 90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
10.	91 s/d 120	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)

Yusuf al Qardhawi menyebutkan bahwa ketentuan dalam tabel di atas, adalah berdasarkan ketentuan *ijmak* ulama, kecuali Ali ra., yang menyebutkan bahwa 25 ekor unta zakatnya 5 ekor kambing (pengganti anak unta betina umur 1 tahun lebih).

Adapun lebih dari 120 ekor unta, menurut kebanyakan ulama setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa batas jumlah minimal wajib zakat unta adalah 5 ekor.

2) Zakat Sapi atau Kerbau

Berdasarkan hasil *ijma'* para *fuqaha*, hewan jenis kerbau disamakan dengan sapi²¹⁴. *Nishab* sapi dan kerbau, menurut pendapat yang masyhur di kalangan mazhab yang empat, adalah 30 ekor, di bawah itu tidak ada zakatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel. IV. 6
Nishab Zakat Sapi atau Kerbau

No	<i>Nishab</i> Sapi/Kerbau	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
	Dari Sampai Dengan	
1.	30 s/d 39	1 ekor sapi jantan/betina (umur 1 tahun)
2.	40 s/d 59	1 ekor sapi jantan/betina (umur 2 tahun)
3.	60 s/d 69	2 ekor anak sapi jantan
4.	70 s/d 79	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun & 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
5.	80 s/d 89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
6.	90 s/d 99	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
7.	100 s/d 109	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun & 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
8.	110 s/d 119	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun & 1 ekor anak

²¹⁴*Ibid.*, h. 193

	sapi jantan umur 1 tahun
--	--------------------------

Penetapan jumlah zakat sapi atau kerbau adalah, setiap bertambah 30 ekor maka zakatnya 1 ekor anak sapi betina/jantan berumur 1 tahun, dan setiap bertambah 40 ekor maka zakatnya satu ekor umur 2 tahun. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

عن معاذ أن رسول الله صلعم بعثه الى اليمن وامره أن يأخذ من البقرة من ثلاثين تبيعاً, ومن كل لربعين مسنة (رواه النسائي)²¹⁵

“Dari Mua’z sesungguhnya Rasulullah saw mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahkannya memungut zakat sapi, setiap 30 ekor wajib dikeluarkan satu ekor umur setahun, dan setiap 40 ekor dikeluarkan satu ekor umur dua tahun”.

3) Zakat Kambing atau Domba

Nishab untuk zakat kambing, domba atau hewan yang sejenisnya ditetapkan berdasarkan hadits dan *ijma*'. Menurut hadits Rasulullah zakat kambing/domba yang digembalakan adalah 40 ekor, dikeluarkan seekor. Jika kambing tersebut mencapai 40 sampai dengan 120 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing. Informasi diperoleh melalui sabda Rasulullah saw:

عن أنس أن ابا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلعم على المسلمين: ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة شاة, فإذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين: ففيها شاتان, فإذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه, فإذا زادت على ثلاث مائة: ففي كل مائة شاة (رواه البخاري)²¹⁶

²¹⁵Imam Nasa-i, *Op. cit.*, h. 26

²¹⁶Al Hafizh Ibn Hajar al ‘Asqalani, *Bulughu al Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: CV. Toha Putra, t.th), h. 278-281

“Dari Anas ra., ia berkata: Bahwasanya Abu Bakar al Shiddiq pernah mengirim surat kepadanya yang isinya sebagai berikut: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah mewajibkan kepada semua orang Islam untuk menunaikan sedekah fardhu: ...“Adapun zakat yang digembalakan, bila telah mencapai 40 ekor sampai dengan 120 ekor kambing ialah satu ekor kambing. Bila mencapai 120 ekor sampai dengan 200 ekor, maka zakatnya dua ekor kambing. Bila mencapai 200 sampai dengan 300 ekor kambing, maka zakatnya tiga ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor, maka zakatnya setiap 100 ekor ialah satu ekor kambing”.

Untuk lebih jelasnya tentang zakat kambing atau domba ini, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel. IV. 7
Nishab Kambing atau Domba

No	<i>Nishab</i> Kambing/Domba Dari Sampai Dengan	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
1.	1 s/d 39	Tidak ada zakatnya
2.	40 s/d 120	1 ekor kambing
3.	121 s/d 200	2 ekor kambing
4.	201 s/d 300	3 ekor kambing
	Ctt: Bila lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.	
5.	301 s/d 400	4 ekor kambing
6.	401 s/d 500	5 ekor kambing
7.	501 s/d 600	6 ekor kambing
	Demikian, seterusnya setiap bertambah 100 ekor kambing, maka zakatnya seekor kambing	

Berkaitan dengan batas umur kambing atau domba yang akan dizakatkan, ulama berbeda pendapat. Menurut golongan Maliki zakat untuk domba yang telah mencapai *nishab* ialah anak domba betina umur setahun atau lebih. Sedangkan kambing yang dizakatkan adalah anak kambing jantan umur 10 bulan atau minimal 6 bulan.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa zakat dari kambing harus anak kambing jantan umur setahun, sedangkan dari domba juga harus jantan dengan

umur minimal 6 bulan. Adapun menurut Hanafi, untuk zakat kambing harus telah berumur setahun, sedangkan domba berumur 6 bulan dan tidak lebih setahun²¹⁷.

6. Zakat Pencarian dan Profesi

Para fuqaha pada prinsipnya sependapat bahwa harta dari berbagai bentuk penghasilan, seperti gaji pegawai, upah karyawan, jasa dokter, advokat dan lain sebagainya bila sampai *nishab*-nya, dan lebih dari kebutuhan wajib dizakatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang waktu mengeluarkannya. Sebagian fuqaha mengatakan zakatnya dikeluarkan ketika menerima upah/gaji bila mencapai *nishab*. Pendapat ini terasa kurang “bijaksana” karena akan membebaskan orang-orang yang menerima upah beberapa kali namun tidak sampai se-*nishab*, akan tetapi bila dikumpulkan akan mencapai se-*nishab* atau boleh jadi beberapa *nishab*.

Dengan demikian, lahir pendapat yang kedua, yakni mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu setahun. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat penghasilan atau profesi.

Kewajiban zakat atas penghasilan dan profesi ini diukur berdasarkan *nishab* emas, dengan zakat sebesar 2,5%²¹⁸. Untuk melihat gambaran jelas mengenai masalah *nishab* dan kuantitas yang dikeluarkan terhadap zakat penghasilan dan profesi, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel. IV. 8

Nishab Zakat Penghasilan dan Profesi

No	Bentuk Penghasilan	Ketentuan Wajib Zakat	Keterangan
----	--------------------	-----------------------	------------

²¹⁷Yusuf al Qardhawi, *Fiqh...., Op. cit.*, h. 213

²¹⁸*Ibid.*, h. 456-489

	& Profesi	<i>Nishab</i>	Kadar	Waktu	
1.	Jasa, konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntan, dokter, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i>-nya 107,76 gram emas murni - Menurut Yusuf al Qardhawi <i>nishab</i>-nya 85 gram emas murni
2.	Pendapatan, gaji, honorium, jasa produksi, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i>-nya 107,76 gram emas murni - Menurut Yusuf al Qardhawi <i>nishab</i>-nya 85 gram emas murni
3.	Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i>-nya 107,76 gram emas murni - Menurut Yusuf al Qardhawi <i>nishab</i>-nya 85 gram emas murni
4.	Uang simpanan, deposito, giro, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut mazhab Hanafi <i>nishab</i>-nya 107,76 gram emas murni - Menurut Yusuf al Qardhawi <i>nishab</i>-nya 85 gram emas murni

Demikianlah, beberapa bentuk harta dan usaha yang wajib zakat, waktu dan kadar yang harus dikeluarkan, bagi setiap *muzakki*-nya.

G. Pendistribusian Zakat

Pada masa Rasulullah saw mereka yang serakah, tidak dapat menahan air liur melihat harta sedekah ataupun zakat. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah saw. Tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah saw, mulai mereka bergunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi. Kemudian turun ayat al Qur'an menyingkapi sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu, dengan menunjukkan kepalsuan mereka yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, ayat tersebut sekaligus menerangkan ke mana sasaran (*masharif*) zakat itu diberikan. Firman itu terdapat dalam surah al Taubah ayat 58-60, yaitu:

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا احسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة الله والله عليم حكيم (التوبة: 60)

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah”, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil*), para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²¹⁹.

Dengan turunnya ayat di atas, harapan orang-orang munafik dan orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi menjadi pupus sudah. Sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya.

Untuk itu firman Allah dalam surah al Taubah ayat 60 di atas, menunjukkan bahwa penyaluran zakat kepada *mustahiq* adalah suatu kewajiban. Dalam banyak nash al Qur'an mengenai zakat, hanya tentang *masharif al zakat* yang dijelaskan secara khusus, karena di sini selalu terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola dana zakat yang bukan haknya. Al Qur'an memberikan perhatian khusus dan kemudian dijelaskan secara rinci oleh hadits Nabi saw²²⁰.

Ketentuan tentang *mustahiq* zakat dalam ayat tersebut dipertegas Rasulullah saw dalam sebuah hadits riwayat Ahmad yang berbunyi:

²¹⁹QS. Al Taubah [9]: 58-60

²²⁰Lihat Yusuf al Qardhawi, Jilid. II, *Op. cit.*, h. 541-543

أتيت رسول الله صلعم فبايعته-وذكر حديثا طويلا-فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة, فقال له رسول الله صلعم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة, حتى حكم هو فيها, فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقا (رواه أحمد)²²¹

“Aku telah menemui Rasulullah saw, lalu aku membai’atnya. Ia menyebutkan sebuah hadits panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki seraya mengatakan: “Berilah aku sedekah!” Maka Rasulullah berkata kepada orang itu: “Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuanNya sendiri. Maka sedekah itu dibagi ke dalam delapan bagian. Bila engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu”.

Sehubungan dengan *mustahiq* zakat ini, Yusuf al Qardhawi mengutip sebuah catatan sejarah penting sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Shihab Zuhri kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang peranan sunnah dalam zakat, dan memintanya untuk menerapkan hal tersebut dalam masa pemerintahannya.

Zuhri berkata:

“Sungguh di dalamnya ada bagian bagi orang yang lemah karena faktor usia (ketidak mampuan), juga bagian setiap fakir miskin, termasuk di dalamnya untuk orang cacat yang tidak bisa mencari nafkah di muka bumi ini (ketidakmampuan yang mendesak, seperti halnya buruh yang tertimpa bencana dalam pekerjaannya ataupun *mujahid* yang terkena serangan dalam peperangan). Juga bagian untuk orang miskin yang meminta zakat dan meminta makanan (dengan mengambil sesuai kebutuhan mereka hingga mereka tidak perlu lagi untuk meminta-minta kepada orang lain). Adapula bagian untuk para tahanan dari kaum muslimin yang tidak memiliki seorang pun sanak saudara. Demikian pula bagian orang miskin yang rajin datang ke masjid yang tidak memiliki sedikitpun harta (tidak memiliki penghasilan dan kehidupan yang teratur), namun mereka tidak pernah memintanya dari orang lain. Selain itu, ada bagian untuk seseorang yang jatuh miskin dan ia mempunyai utang yang tidak berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah dan tidak diragukan keshalehan dan ketaatan agamanya. Termasuk pula bagian untuk setiap musafir yang tidak memiliki tempat berteduh dan tidak ada seorang pun yang memberikan tempat untuk mereka, maka ia berhak untuk diberikan tempat berteduh dan makanan, termasuk kudanya diberikan pula makanan sehingga ia bisa mendapatkan rumah atau telah terpenuhi kebutuhannya”²²².

²²¹Al Hafizh Ibn Hajar al Asqalani, *Op. cit.*, h. 307

²²²Yusuf al Qardhawi, *Spektrum...*, *Op. cit.*, h. 58-59

Untuk melihat lebih jelas siapa saja *mustahiq zakat* yang dimaksud firman Allah dalam surah al Taubah ayat 60 itu, dapat dilihat uraian berikut:

1. Fakir dan Miskin

Golongan penerima zakat sebagaimana disebut dalam surah al Taubah ayat 60 adalah fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah Swt. Ini menunjukkan, sasaran zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Thabari menyebutkan sebagaimana dikutip Yusuf al Qardhawi, yang dimaksud dengan fakir ialah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan yang dimaksud dengan miskin ialah orang yang dalam mencukupi kebutuhannya suka meminta-minta²²³. Perbedaan ini sebenarnya membawa pemahaman yang mendalam, dan pihak yang berwenang harus benar-benar cermat dalam memperhatikan orang fakir, karena mereka tidak mau meminta-minta.

Menurut mazhab Hanafi, fakir adalah mereka yang memiliki harta, tetapi tidak sampai satu *nishab* zakat. Sedangkan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa²²⁴. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan ataupun papan, baik untuk keperluan dirinya sendiri ataupun orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang mempunyai kebutuhan sepuluh rupiah perhari, tetapi yang ada hanya

²²³Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 511

²²⁴*Ibid.*, h. 512-513

tiga atau dua rupiah saja. Adapun miskin ialah yang orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan sepuluh, tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu *nishab* atau beberapa *nishab*²²⁵. *Nishab* adalah hal yang membedakan antara orang yang wajib zakat dengan yang menerima zakat. *Nishab* berupa kekayaan yang dihitung setelah kebutuhan pokok terpenuhi²²⁶.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ahmad dari ‘Ubaidillah ibn ‘Adi dijelaskan oleh Rasulullah saw:

ان رجلين أخبراه انهما أتيا النبي يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورأهما (قويين) إن شئتما أعطيتكما, ولا حظ فيها (فى الزكاة) لغني ولا لقوي مكتسب (رواه احمد)²²⁷

“Bahwasanya telah datang dua orang pria kepada Nabi meminta zakat, lalu Nabi memicingkan matanya kepada dua orang itu dan memperhatikannya secara seksama. Kemudian beliau bersabda: “Kalau kalian menghendaki akan aku beri, tetapi zakat bukan bagian orang kaya dan orang yang kuat bekerja”.

Selanjutnya diinformasikan bahwa Rasulullah saw memberikan kepada dua orang itu zakat. Karena beliau tidak tahu persis keadaan kedua orang itu yang sebenarnya. Kelihatannya kedua orang itu kuat dan mampu, tapi kenyataannya tidak mempunyai usaha, atau mungkin mempunyai usaha, tetapi tidak mencukupi. Hadits di atas sekaligus menjadi dalil bahwa orang yang telah berusaha, tetapi belum mampu mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, dapat diberikan zakat.

2. Amil

²²⁵*Ibid.*

²²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 146-147

²²⁷Jalaluddin al Suyuthi, *al Jawami' al Shaghir*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Juz. II, h. 179-180

Sasaran ketiga dari zakat setelah fakir miskin, ialah para amil zakat. Amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, serta mulai dari pencatat sampai kepada para penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para *mustahiq*-nya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain zakat.

Amil ini disebut juga dengan *sa'i* (orang yang diutus untuk memungut), *katib* (sekretaris), *al hasyir* (orang yang mengumpulkan para wajib zakat), *al 'arif* (penunjuk jalan), *al hasib* (penghitung dan penjaga harta zakat)²²⁸. Menurut Ibnu Hazm-fuqaha dhahiri-menyebutkan bahwa amil adalah pekerja yang diangkat oleh pemerintah yang wajib ditaati²²⁹.

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 8 disebutkan bahwa tugas pokok amil adalah “mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama”²³⁰.

Melihat pengertian amil di atas, dapat dikatakan bahwa amil zakat terdiri dari beberapa orang sesuai dengan pembagian tugasnya yang mengurus pelaksanaan zakat, mengumpulkan, menjaga, mencatat, menghitung dan meneliti orang-orang yang membutuhkan serta mendistribusikan. Dengan adanya kelompok ini sebagai *mustahiq* zakat menunjukkan bahwa zakat bukanlah pekerjaan mudah yang sepenuhnya diserahkan kepada individu, tetapi wajib

175 ²²⁸Al Nawawi, *Raudhah al Thalibin*, (Beirut: Dar al Kutb al Ilmiyyat, t.th), Jilid ke-2, h.

²²⁹Ibnu Hazm, *al Muhalla*, (Mesir: Maktabah al Arabiyah, 1968), Jilid ke-6, h. 231

²³⁰Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 8

ditangani oleh pemerintah, dan pemerintah wajib mengangkat orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat²³¹.

Umar bin Khattab seorang khalifah telah melakukan dakwah *bilhal* yang sekaligus memberikan tuntunan bagaimana sikap dan perilaku seorang amil. “Di suatu siang Umar berada di bawah pohon, lalu seorang wanita badui hendak menanyakan keberadaan *Amirul Mukminin* kepada seseorang, sehingga kemudian wanita budak itu pun mendatangi Umar dan berkata : “Aku adalah wanita miskin yang mempunyai banyak anak, sesungguhnya *Amirul Mukminin* Umar bin Khattab telah mengutus Muhammad bin Musallamah sebagai petugas penarik dan pengumpul zakat di daerah kami. Namun ia tidak memberikannya kepada kami; semoga engkau mau merekomendasikan kami untuk menemui *amirul mukminin*. Lalu Umar berteriak: “Yarfath! (nama pembantunya), panggil Muhammad bin Musallamah”. Lalu wanita itu berkata: “Sesungguhnya ini berkaitan dengan kebutuhanku, biar aku yang bicara dengannya”. Lalu Umar berkata: “Insya Allah ia akan melaksanakan tugasnya”. Lalu Yarfath mendatangnya dan berkata: “Baiklah...,” untuk kemudian Muhammad bin Musallamah pun datang dan berkata: “Salam bagimu wahai *amirul mukminin*”. Wanita itu malu melihatnya. Lalu Umar berkata: “Demi Allah, betapa aku sangat selektif dalam memilih orang terbaik di antaramu. Apa yang akan kau katakan apabila kamu diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang ini?”. Air mata Muhammad mulai menetes. Lalu Umar kembali berkata: “Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi-Nya kepada kita dan kita pun telah meyakini dan mengikuti semua ajaran yang

²³¹Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 579

disampaikannya. Beliau beramal dan bekerja sesuai dengan perintah Allah dan menjadikan zakat sebagai hak orang miskin hingga Allah mengangkatnya ke hadirat-Nya lalu Allah menggantikan posisinya dan menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah setelahnya. Ia lalu mengerjakan semua sunnah Rasulullah saw hingga Allah mengangkatnya ke hadirat-Nya. Lalu aku menggantinya dan aku memilih orang terbaik di antaramu... Sesungguhnya tugasmu sebagai utusan untuk mendistribusikan zakat tahunan. Aku tidak tahu, mungkin sebaiknya aku tidak mengutusmu...” Kemudian Umar mendatangkan unta untuknya serta memberikan tepung dan minyak. Lalu berkata kepadanya: “Ambillah ini hingga kami datang ke Khaibar. Sesungguhnya kami akan mendatangnya...” Lalu Umar pun mendatangi wanita tersebut di Khaibar dan memberikan untuknya dua unta lainnya. Lalu ia berkata: “Ambillah ini, sesungguhnya di dalamnya terdapat satu perintah hingga datang kepadamu Muhammad bin Musallamah. Aku telah memerintahkannya untuk memberikan hak mu setiap tahunnya dan untuk tahun pertamamu”²³². Dengan demikian, berargumentasi kepada perilaku Umar bin Khattab di atas, dapat dikatakan bahwa seorang amil zakat bertanggung jawab penuh kepada Allah dalam tugasnya, sehingga jangan pernah melewatkan bagian para *mustahiq* zakat, terlebih bagian fakir dan miskin.

Yusuf al Qardhawi menerangkan syarat-syarat amil yang ditunjuk, yaitu: Orang Islam yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya, jujur, mengetahui hukum syariat terutama tentang ketentuan zakat, dipandang mampu untuk

²³²Yusuf al Qardhawi, *Spektrum...*, *Op. cit.*, h. 55-56

melaksanakannya²³³. Sifat jujur (amanah) adalah syarat terpenting yang harus dimiliki oleh amil, bahkan lebih dipentingkan dari pada kemampuannya²³⁴.

Amil itu adalah pegawai, maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Perihal bagian amil, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai kuantitas yang harus mereka terima. Menurut imam Syafi'i amil diberi 1/8 sebagaimana *mustahiq* yang lain²³⁵. Menurut jumhur ulama fuqaha (Hanafi, Maliki, dan Hanbali), amil diberi hak sesuai dengan kerjanya yang bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya secara wajar²³⁶. Imam al Ghazali menyebutkan amil digaji tidak boleh lebih dari upah yang wajar, jika lebih dari 1/8, maka harus dikembalikan kepada ashnaf yang lain, tetapi jika kurang, boleh ditambah dari harta milik umum atau *baitu al mal*²³⁷.

3. Muallaf

Kelompok sasaran zakat yang ketiga adalah *muallaf*, yaitu mereka yang dibujuk hatinya dan mengukuhkan hatinya. Abu Ya'la menjelaskan bahwa *muallaf* yang dibujuk hatinya ada empat golongan, yaitu golongan yang dibujuk hatinya karena membentengi umat Islam, yang dibujuk hatinya untuk menimbulkan rasa cintanya kepada Islam dan golongan yang dibujuk untuk kecenderungan kaum dan keluarganya terhadap Islam²³⁸. Yusuf al Qardhawi mengklasifikasikan golongan ini kepada beberapa macam, yaitu mereka yang

²³³*Ibid.*, h. 586-589

²³⁴Sebagian ulama mensyaratkan amil itu harus laki-laki dan ada juga yang mensyaratkan orang merdeka, begitu pula dengan persyaratan miskin dan kaya.

²³⁵Imam Syafi'i, *al Umm, Op. cit.*, h. 80

²³⁶Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al Zajaj, Op. cit.*, h. 556

²³⁷Al Ghazali, *Ihya 'Ulum al Din*, (Beirut: Maktabah al Mushatafa, t.th). h. 229

²³⁸Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 146-147

diharapkan keislamannya, kelompok dan keluarnya, (dapat juga berarti golongan yang ditakutkan perbuatan jahatnya), golongan yang masuk Islam yang mempunyai banyak pengikut dan dapat pula berarti orang yang berpengaruh pada kaumnya tetapi masih lemah imannya²³⁹. Dengan adanya golongan ini sebagai sasaran zakat, jelaslah bahwa zakat bukan hanya sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan dan bukan pula sekedar ibadah *mahdhah*, tetapi juga mempunyai tujuan politis yang sangat menentukan.

4. Memerdekakan Hamba Sahaya

Kelompok ini dapat meliputi, pembelian hamba sahaya kemudian memerdekakan, diberikan kepadanya sejumlah uang untuk menebus diri dari tuannya. Menurut Abu Zahrah, setiap negara yang membutuhkan bantuan, termasuk bantuan memerangi perbudakan, sepantasnya dijadikan sasaran dana zakat dalam kelompok ini. Tetapi, oleh karena perbudakan zakat sekarang ini tidak ada lagi, sasaran ini ditujukan kepada orang-orang Islam yang ditawan musuh²⁴⁰.

5. *Al Gharimun*

Asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap²⁴¹, seperti firman Allah Swt: “Sesungguhnya siksa neraka jahanam adalah tetap/kekal”²⁴². Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *gharim*, karena utang telah tetap padanya, dan disebutkan ia *ghariim* karena tetap padanya orang yang mempunyai piutang. Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan

²³⁹Yusuf al Qardhawi, *Op. cit.*, h. 594-596

²⁴⁰Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 156-157

²⁴¹Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, *Op. cit.*, h. 594

²⁴²QS. 25: 65

dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya²⁴³. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, membagi orang yang mempunyai utang kepada dua golongan yang masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian dapat ditegaskan *al qharimun* adalah orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya. Mereka ini ada beberapa macam:

- a. Orang yang berutang karena boros, yang berbelanja untuk hal yang halal dan haram. Sebagian ulama berpendapat utangnya tidak dibayar oleh harta zakat, kecuali bila ia bertaubat.
- b. Orang yang berutang bukan karena boros, tetapi untuk kebaikan dirinya, orang seperti ini berhak menerima zakat untuk pembayaran utangnya.
- c. Orang yang berutang karena kemaslahatan umum, seperti orang yang menanggung *diyat* dalam kasus pidana yang diselesaikan secara damai. Inilah golongan *qharimun* yang harus diutamakan²⁴⁴.

6. *Fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah)

Sasaran ini menurut jumhur ulama adalah membelanjakan harta zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas yang menjaga perbatasan²⁴⁵. Menurut Sayyid Sabiq, golongan ini adalah tentara sukarelawan yang tidak mendapat gaji dari pemerintah²⁴⁶. Termasuk juga dalam kelompok ini orang yang berdakwah untuk agama Islam dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan ancaman karena itu juga termasuk jihad²⁴⁷.

7. Ibnu Sabil

²⁴³Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, *Loc. Cit.*

²⁴⁴*Ibid.*, h. 158. Lihat juga Wahbah al Zuhaili, *Op. cit.*, h. 873

²⁴⁵Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, *Op. cit.*, h. 660

²⁴⁶Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 31-32

²⁴⁷Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, *Op. cit.*, h. 669

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *Al Sabil* artinya *al thariq* (jalan). Orang yang berjalan di atasnya disebut *ibnu sabil* karena tetapnya ia di jalan itu²⁴⁸.

Ibnu Zaid berkata sebagaimana dikutip oleh Yusuf al Qardhawi: “Ibnu Sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila kehabisan bekalnya, atau hartanya samasekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah terhadap bekal (hartanya), atau ia samasekali tidak memiliki apa-apa²⁴⁹.

Para ulama berpendapat bahwa musafir yang kehabisan bekal boleh diberi sebagian dari harta zakat sekedar untuk mencukupi bekalnya selama dalam perjalanan; walaupun ia orang kaya di daerahnya, karena ia berada di tempat yang jauh dan tidak dapat memanfaatkan hartanya dan tidak bisa mendapatkan pinjaman. Para ulama mensyaratkan bahwa perjalanan itu hendaklah dalam ketaatan kepada Allah atau bukan dalam kemaksiatan²⁵⁰.

Demikianlah beberapa konsep Islam tentang pengertian zakat, urgensi ditetapkannya kewajiban zakat, sejarah diwajibkan zakat dan dasar hukumnya, syarat-syarat orang yang berzakat dan sifat-sifat harta yang dizakatkan, harta yang wajib dizakati, ketetapan *nishab* masing-masing, serta *mustahiq* zakat.

II. Zakat Menurut Perundang-undangan di Indonesia

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pengelolaan zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

²⁴⁸*Ibid.*, h. 645

²⁴⁹*Ibid.*

²⁵⁰Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 162

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat²⁵¹. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah²⁵².

Pelaksanaan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) adalah dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat²⁵³.

Badan Amil Zakat (BAZ) menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 Pasal 1 sub (1) yang dimaksud dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama²⁵⁴.

BAZ memiliki tingkatan sebagai berikut :

1. Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul dari Menteri Agama
2. Propinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
3. Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupti atau Walikota atas usul dari kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²⁵¹UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (1)

²⁵²Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), hal. 6

²⁵³UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6 Ayat (1)

²⁵⁴Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2)

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu, suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi/lembaga pemerintah dan perusahaan swasta di semua tingkatan. Sedangkan untuk BAZ Kecamatan dibentuk pula UPZ di tiap-tiap desa/kelurahan. Tugas UPZ adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan menyetorkan hasilnya kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana BAZ²⁵⁵.

Struktur organisasi BAZ terbagi dalam tiga bagian yaitu : Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Tugas dari masing-masing struktur tersebut adalah :

1. Dewan Pertimbangan, bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.
2. Komisi Pengawas, Bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
3. Badan Pelaksana, bertugas untuk melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat.

Kepengurusan BAZ ditetapkan setelah melalui beberapa tahapan seleksi, yaitu sebagai berikut :

²⁵⁵Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Pasal 9 Ayat (8).

1. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya, masyarakat terkait dan pemerintah.
2. Menyusun kriteria calon penyusun.
3. Mempublikasikan para calon pengurus.
4. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
5. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi²⁵⁶.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BAZ yang telah terbentuk secara resmi adalah :

1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah diperoleh dari daerah masing-masing sesuai dengan

²⁵⁶Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Op. Cit*, hal 7

tingkatannya.

Apabila BAZ tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas maka dapat diadakan peninjauan ulang terhadap keberadaan BAZ tersebut dengan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pemberian peringatan tertulis sebanyak maksimal tiga kali oleh Pemerintah yang membentuknya.
2. Jika setelah diberikan peringatan tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan BAZ dengan susunan pengurus yang baru, sesuai mekanisme yang berlaku.

Tugas pokok BAZ adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan oleh bagian pengumpulan atau melalui UPZ. Selain zakat, BAZ dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat. Terhadap setiap zakat yang diterima, BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima. Sedangkan bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan BAZ (bagi LAZ nomor lengkap pengukuhan LAZ).
2. Nomor urut bukti setoran.
3. Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetorkan dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul.

5. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ atau LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ atau LAZ.

Bukti setoran tersebut kemudian dibuat rangkap tiga dengan rincian sebagai berikut:

1. Lembar 1 (asli) diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.
2. Lembar 2 diberikan kepada BAZ atau LAZ sebagai arsip.
3. Lembar 3 digunakan sebagai arsip Bank Penerima jika zakat disetor melalui bank.

Penghitungan zakat dapat dilakukan sendiri oleh muzakki atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam hal muzakki mengalami kesulitan untuk melakukan penghitungan, maka BAZ ataupun LAZ dapat membantu muzakki dalam melakukan penghitungan.

Zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran zakat tersebut harus bersifat hibah (bantuan). Penyaluran batuan zakat tersebut dapat bersifat:

1. Bantuan Sesaat, yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.
2. Bantuan Pemberdayaan, Yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Penyaluran dana zakat tersebut harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayah masing-masing kecuali penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZ Nasional dapat diberikan kepada *mustahiq* di seluruh Indonesia. Dalam hal tertentu, BAZ dapat menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerjanya, dengan mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan BAZ yang berada di wilayah tersebut.

Mengenai pengawasan terhadap kinerja BAZ, dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas BAZ sesuai dengan tingkatan masing-masing serta secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik. Ruang lingkup pengawasan meliputi keuangan, kinerja BAZ dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syari'ah. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir. Kemudian hasil pengawasan tersebut di sampaikan kepada Badan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya.

Laporan pelaksanaan tugas BAZ disampaikan BAZ kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan masing-masing. Materi laporan tersebut meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan oleh BAZ seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak

benar harta zakat, infaq shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, maka menurut Pasal 21 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no 38 UU tahun 1999, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam²⁵⁷.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapat pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing-masing yaitu:

1. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama
2. Daerah propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
3. Daerah kabupaten, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor departemen Agama Kabupaten atau kota
4. Daerah Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Untuk dapat dikukuhkan, maka LAZ harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan pernyataan, sebagai berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hukum).

²⁵⁷Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, Pasal 1 Ayat (2)

2. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
3. Memiliki program kerja.
4. Memiliki perbukuan.
5. Bersedia untuk diaudit.

Setiap LAZ harus mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, karena hanya LAZ yang telah dikukuhkan saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayar dananya. Setelah mendapat pengukuhan dari pemerintah, LAZ mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Sebagaimana BAZ, LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban seperti di atas, maka pemerintah akan menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali. Dan apabila setelah diperingatkan LAZ tersebut tidak ada perbaikan maka pengukuhan nya dapat ditinjau ulang bahkan dapat dilakukan pencabutan pengukuhan. Akibat dari pencabutan pengukuhan tersebut adalah :

- a. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah.
- b. Tidak diakui nya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c. Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat di Baznas Kota Pekanbaru masih perlu optimalkan, karena sumber terbesar pemasukan Baznas Kota Pekanbaru, masih pada zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan zakat dari berbagai dunia usaha dan jasa belum terkelola.
2. Banyaknya sumber dana zakat yang belum terkelola oleh Baznas Kota Pekanbaru menyebabkan zakat belum berfungsi efektif dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq* zakat karena keterbatasan dana yang terkumpul dan belum maksimalnya pendistribusian zakat dalam bentuk program produktif.

B. Saran

1. Kepada pengelola zakat, perlu adanya program yang jitu untuk meningkatkan ekonomis *mustahiq* zakat.
2. Kepada pemerintah terkait, perlu tekanan pemerintah kepada para pengusaha untuk mengeluarkan zakat mereka kepada Baznas.
3. Para *Muzakki* seharusnya zakat dikeluarkan melalui Baznas, agar terkelola dengan menjadi dana yang optimal sehingga dapat didistribusikan dengan optimal pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), Cet. Ke-25
- Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jild. 6
- Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala al Madzahib al Arba'ah*, Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Dar al Ulum Press), Jilid. 4
- , *Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, (Beirut: Dal Ihya', t.th), Jilid. I, Cet. Ke-3
- Abdurrahman Qadir, *Zakat, dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Abu Luwis al Ma'lufi, *Munjid fi al Lughah*, (Mesir: Al Syarkiyah, 1925)
- Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1987)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Al Ashfahani, *al Mufradat fi Gharib al Quran*, (Beirut: Dar al Ma'rifat, t.th)
- Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Istambul: Dar al fikr, t.th), Juz. I
- Al Ghazali, *Ihya 'Ulum al Din*, (Beirut: Maktabah al Mushatafa, t.th). h. 229
- Al Nawawi, *Raudhah al Thalibin*, (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyyat, t.th), Jilid 2
- A. Qodri Azizy, *Cara kaya dan Menuai Surga*, (Jakarta: Renaisan, 2005), Edisi Revisi, Cet. I
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, t.th)
- Fu'ad Bustani, *Munjid al Tullab*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1986)
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981)

Ibn Hajar al Asqalani, *Fath al Bari bi Syarh al Bukhari*, (Kairo: Dar al Rayyan al Turats, t.th), Juz. III

- , *Bulughu al Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: CV. Toha Putra, t.th)

Ibnu Hazm, *al Muhalla*, (Mesir : Maktabah al Arabiyah, 1968), Jilid 6

Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi*, (Kairo: Dar al Hadits, 1994), Cet. Ke-1, Jilid. IV

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz. Ke1 & 2

Imam Nasa-i, *Sunan al Nasa-i bi Syarh Jalaluddin al Suyuthi*, (Beirut: Dar al Ma'arif, 1991), Juz V & VI

Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab al Umm fi al Fiqh*, Terj. Mohammad Yasir Abd. Muthalib, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. Ke-1

Jalaluddin al Suyuthi, *al Jawami' al Saghir*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Juz. II

Leslie W Rue, dkk, *Management: Theory and Application*, (Homewood: Richard Irwin Inc, 1980)

M. Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 1989)

M. Quraish Shibab, *Membumikan al Quran (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet. XXI

M. Zaidi Abdad, Drs, M.Ag, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), Cet. Ke-1

Mahmud Syalthut, *Min Tanjihah al Islam*, (Kairo: Dar al Qalam, 1966)

Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Intermasa, 1992), Edisi I

Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1973), Cet. Ke-2

Taqyudin an Nabhani, *An Nidham al Iqtishadi Fil Islam*, Terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), Cet. VI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), Jilid 1

Yusuf al Qardhawi, *Dauru al Zakat, Fi 'Ilaaj al Musykilaat al Iqtishaadiyah*, Terj. Sari Narulita, Lc, *Spektrum Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Keyakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. I

- , *Fiqh Zakat*, (Beirut : Muassasah al Risalah, 1993), Jilid II, Cet. Ke-21
- , *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al Quran dan Hadits*, Terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), Cet. Ke-6
- , *Musykilat al Farq wa Kaifa 'Alajaha al Islam*, (Kairo: Maktabah Wahdah, 1980)

B. JURNAL

A. Hamid S. Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta: Majalah Dua Bulanan Ditbinperta Islam, 1992)

Maghfirah, *Urgensi Kewajiban Zakat dalam Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2005), Vol. IV

Zulfahmi Bustami, *Implikasi Positifkasi Hukum Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), Vol. VII

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat

